



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55813
Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006
Posel : setda@gunungkidulkab.go.id, Laman : setda.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 060/110/2019
TENTANG
PETA PROSES BISNIS PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diperlukan penataan ketatalaksanaan; dan
- b. bahwa agar penataan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana, berdaya guna dan berhasil guna perlu menyusun peta proses bisnis pada Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Peta Proses Bisnis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta proses bisnis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 060/069 tentang Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

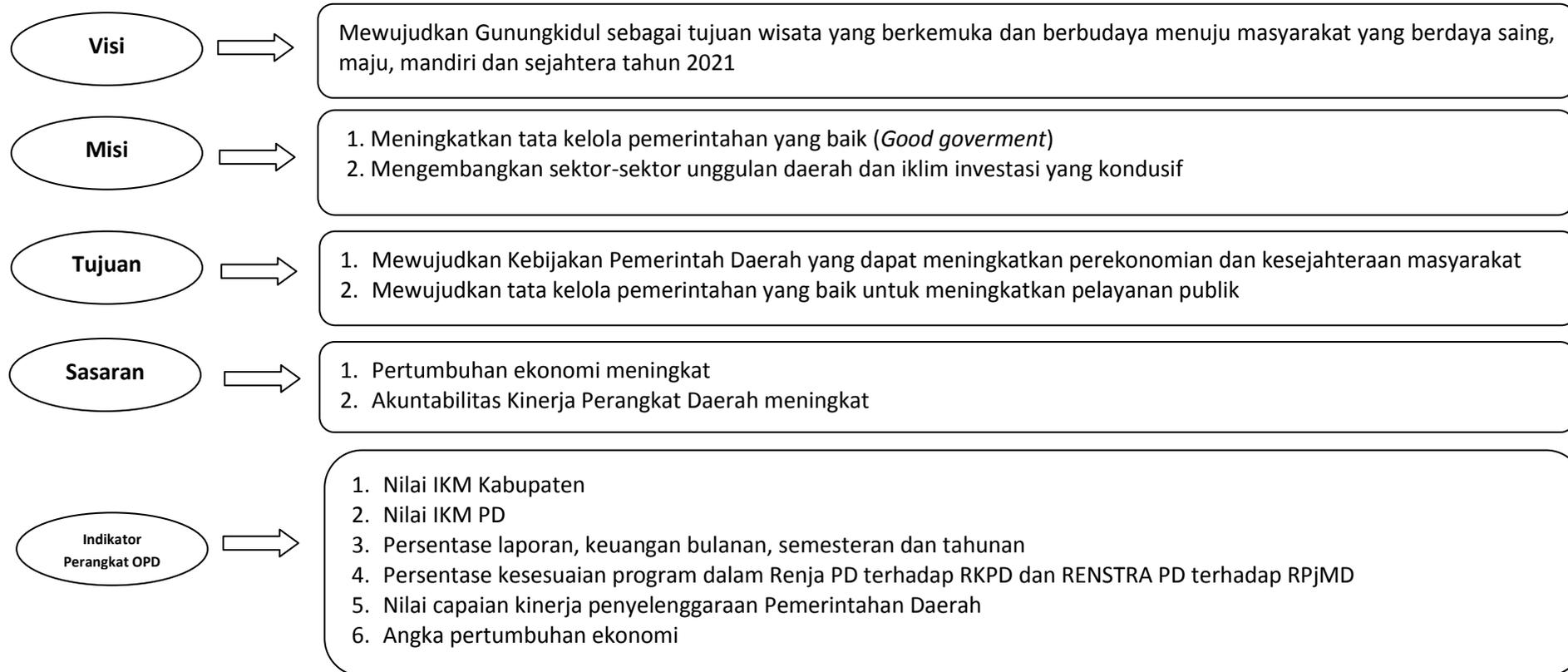
Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

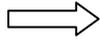
ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR
TENTANG
PETA PROSES BISNIS PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

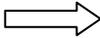


Sasaran OPD



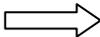
1. Pertumbuhan ekonomi meningkat
2. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah meningkat
3. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meningkat
5. Nilai AKIP Pemerintahan Daerah meningkat
6. Pertumbuhan ekonomi meningkat

**Indikator Sasaran
OPD**



1. Nilai IKM Kabupaten
2. Nilai IKM PD
3. Persentase laporan, keuangan bulanan, semesteran dan tahunan
4. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan RENSTRA PD terhadap RPjMD
5. Nilai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Angka pertumbuhan ekonomi

Program PD



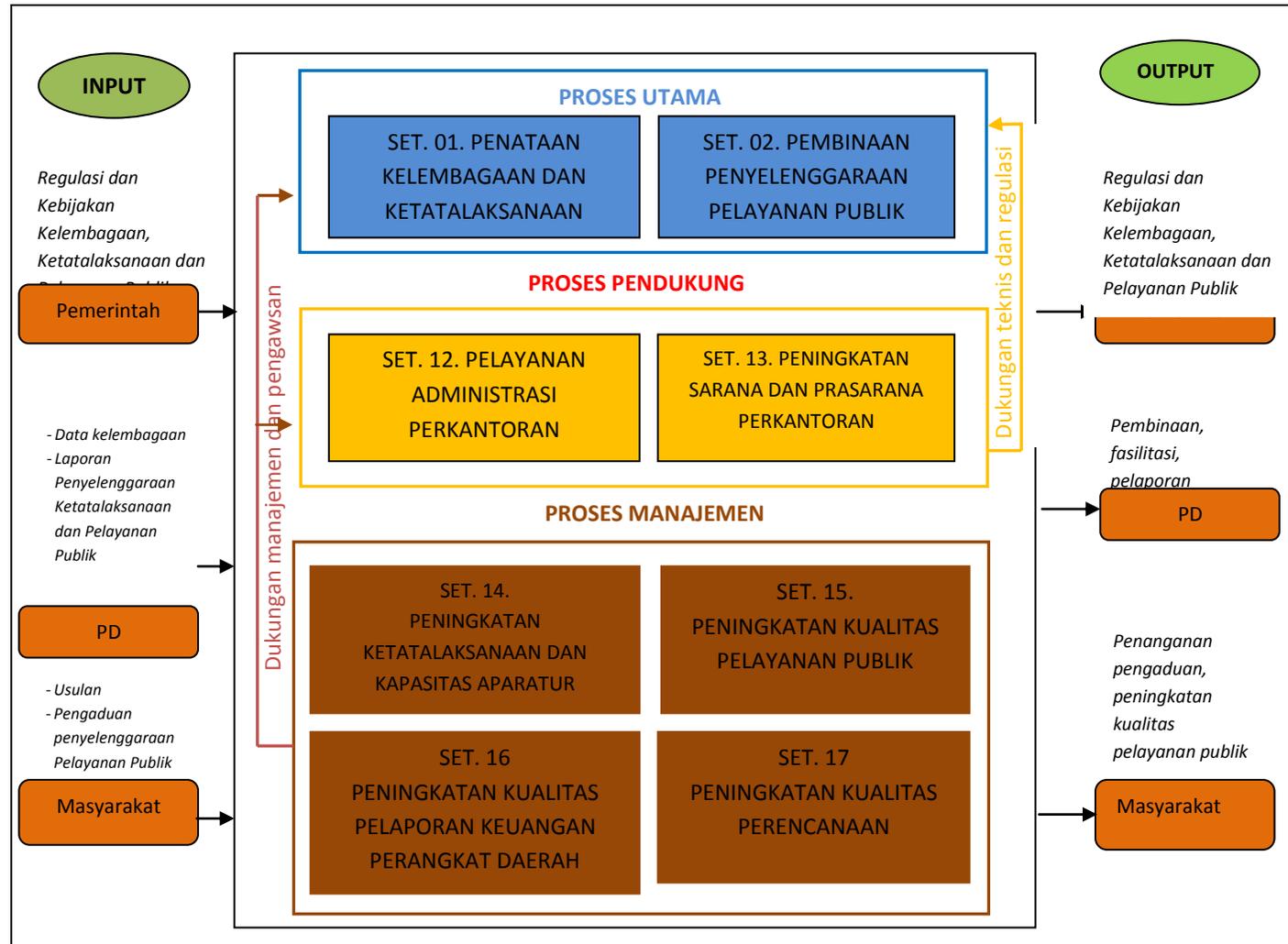
1. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
2. Program pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik
3. Program penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Program optimalisasi akuntabilitas kinerja pemerintahan
5. Program peningkatan kerjasama antar pemerintahan daerah
6. Program pembinaan wilayah
7. Program peningkatan kesejahteraan rakyat
8. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
9. Program penataan Peraturan Perundang-undangan
10. Program analisis kebijakan pembangunan
11. Program peningkatan perekonomian dan SDA
12. Program pelayanan administrasi perkantoran
13. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
14. Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur
15. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
16. Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah
17. Program peningkatan kualitas perencanaan

TABEL INSTRUMEN

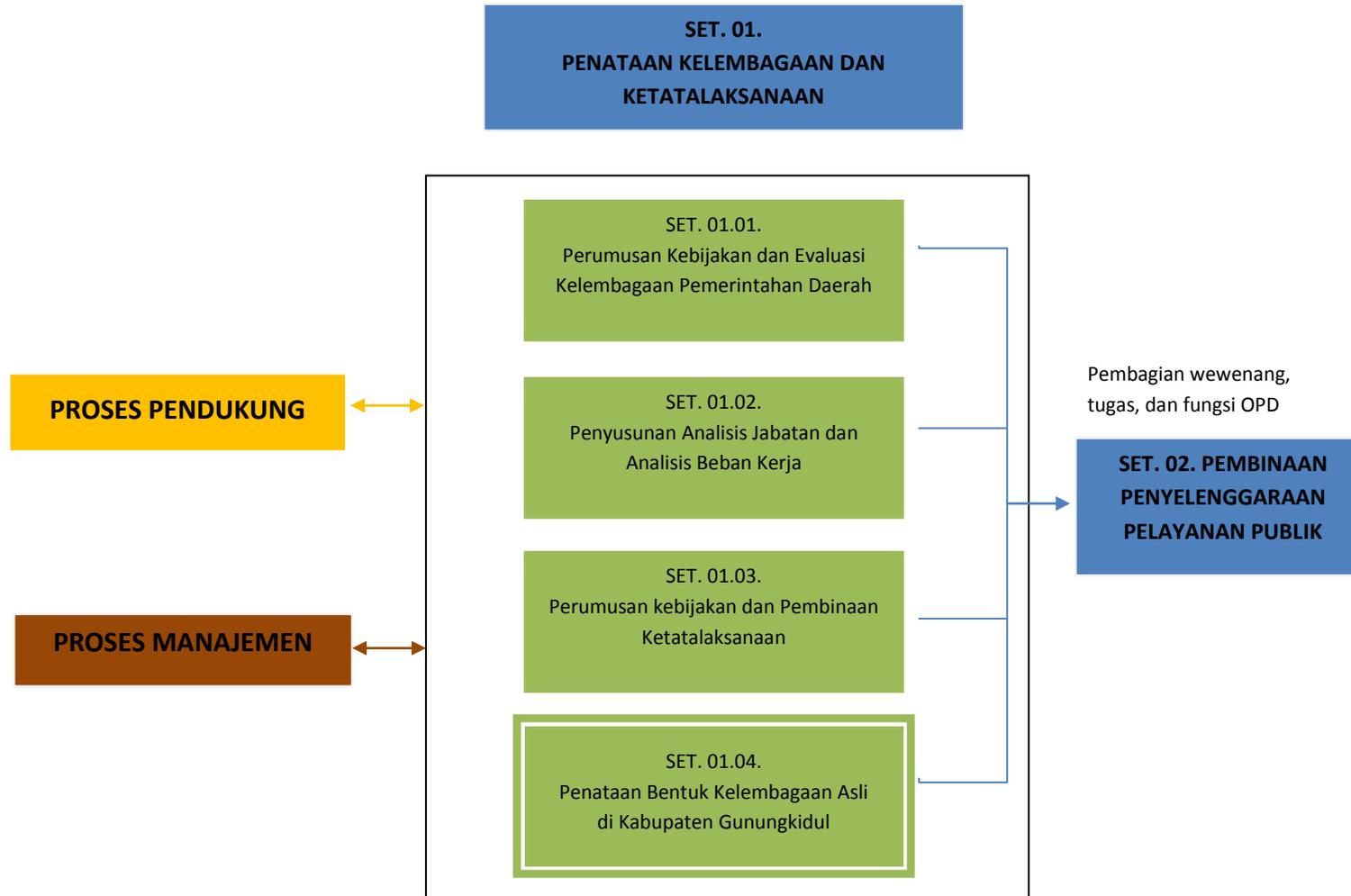
No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Utama	SET.01
2.	Program pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik	Utama	SET.02
3.	Program penyelenggaraan pemerintahan daerah	Utama	SET.03
4.	Program optimalisasi akuntabilitas kinerja pemerintahan	Utama	SET.04
5.	Program peningkatan kerjasama antar pemerintahan daerah	Utama	SET.05
6.	Program pembinaan wilayah	Utama	SET.06
7.	Program peningkatan kesejahteraan rakyat	Utama	SET.07
8.	Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Utama	SET.08
9.	Program penataan Peraturan Perundang-undangan	Utama	SET.09
10.	Program analisis kebijakan pembangunan	Utama	SET.10
11.	Program peningkatan perekonomian dan SDA	Utama	SET.11
12.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pendukung	SET.12
13.	Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Pendukung	SET.13
14.	Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur	Manajemen	SET.14
15.	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Manajemen	SET.15
16.	Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah	Manajemen	SET.16
17.	Program peningkatan kualitas perencanaan	Manajemen	SET.17

PEMETAAN PROSES BISNIS SASARAN 1

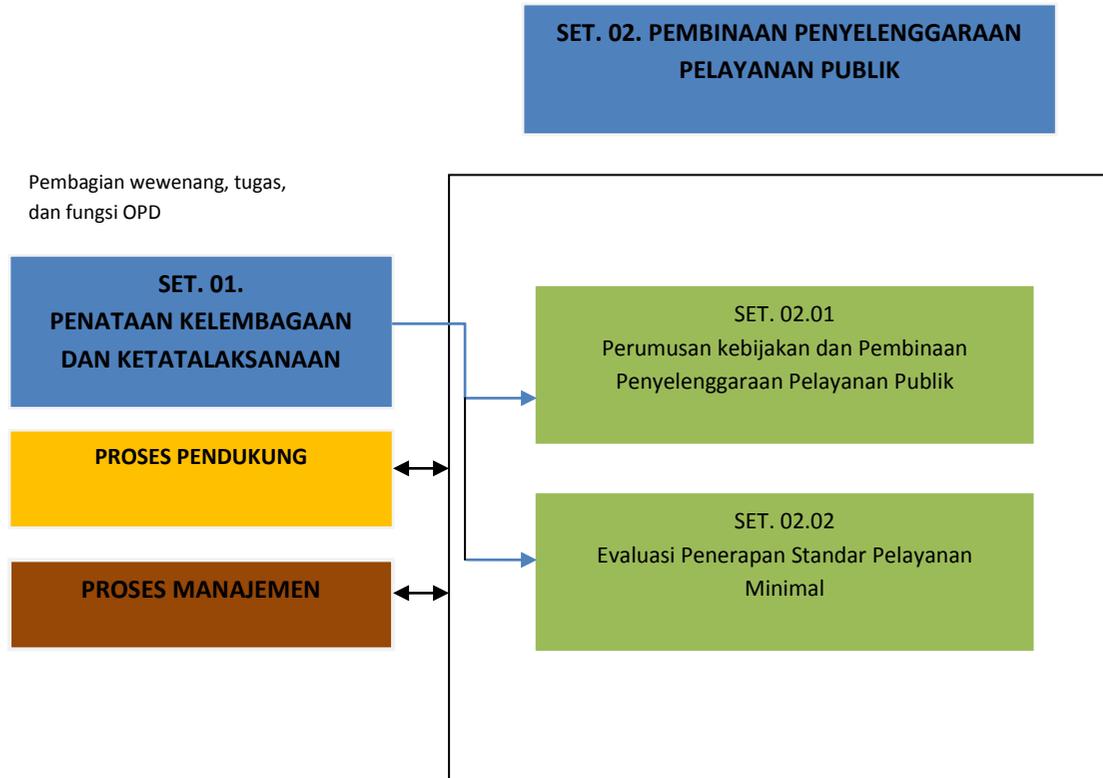
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MENINGKAT



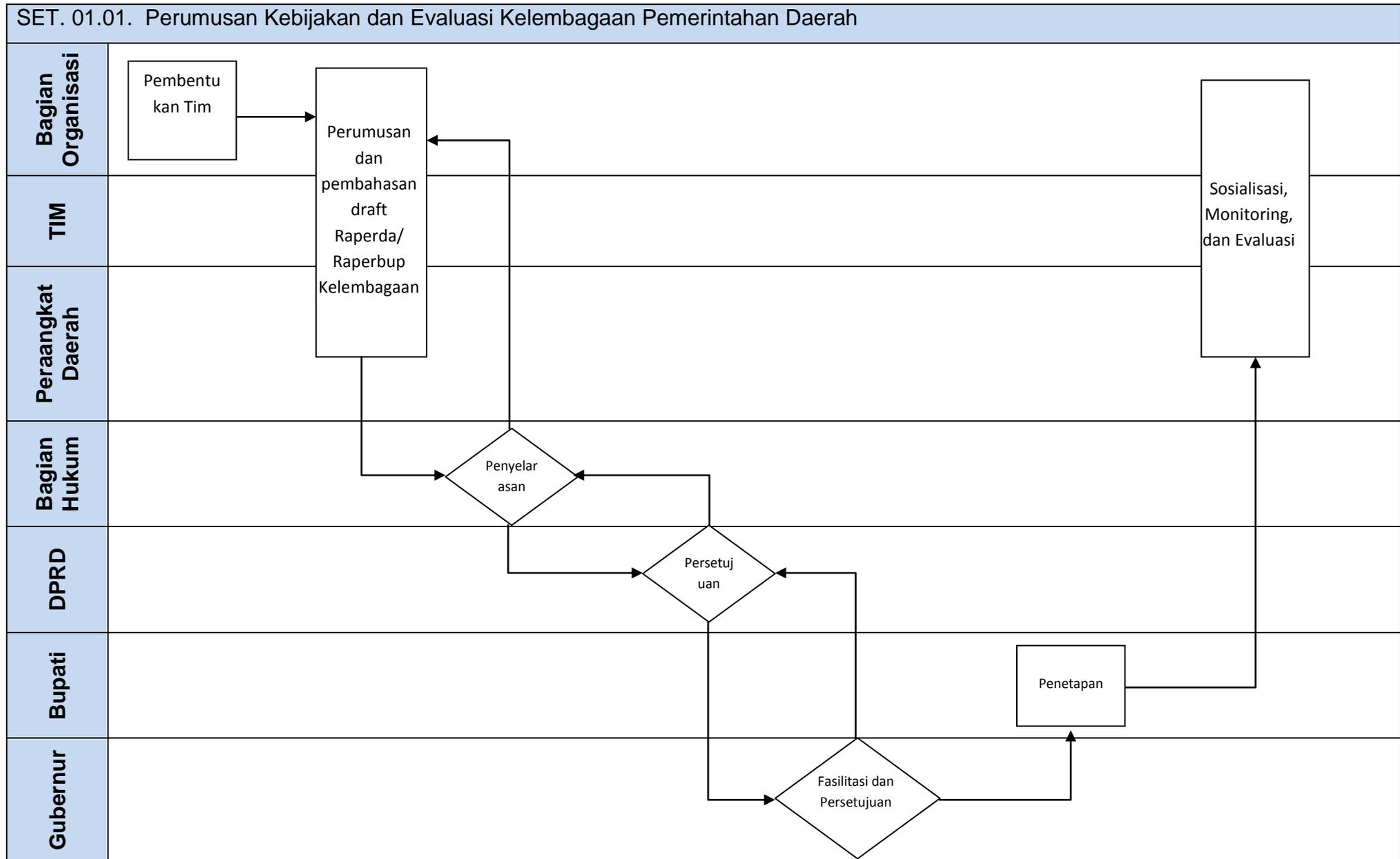
PETA SUB PROSES SET. 01 PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN



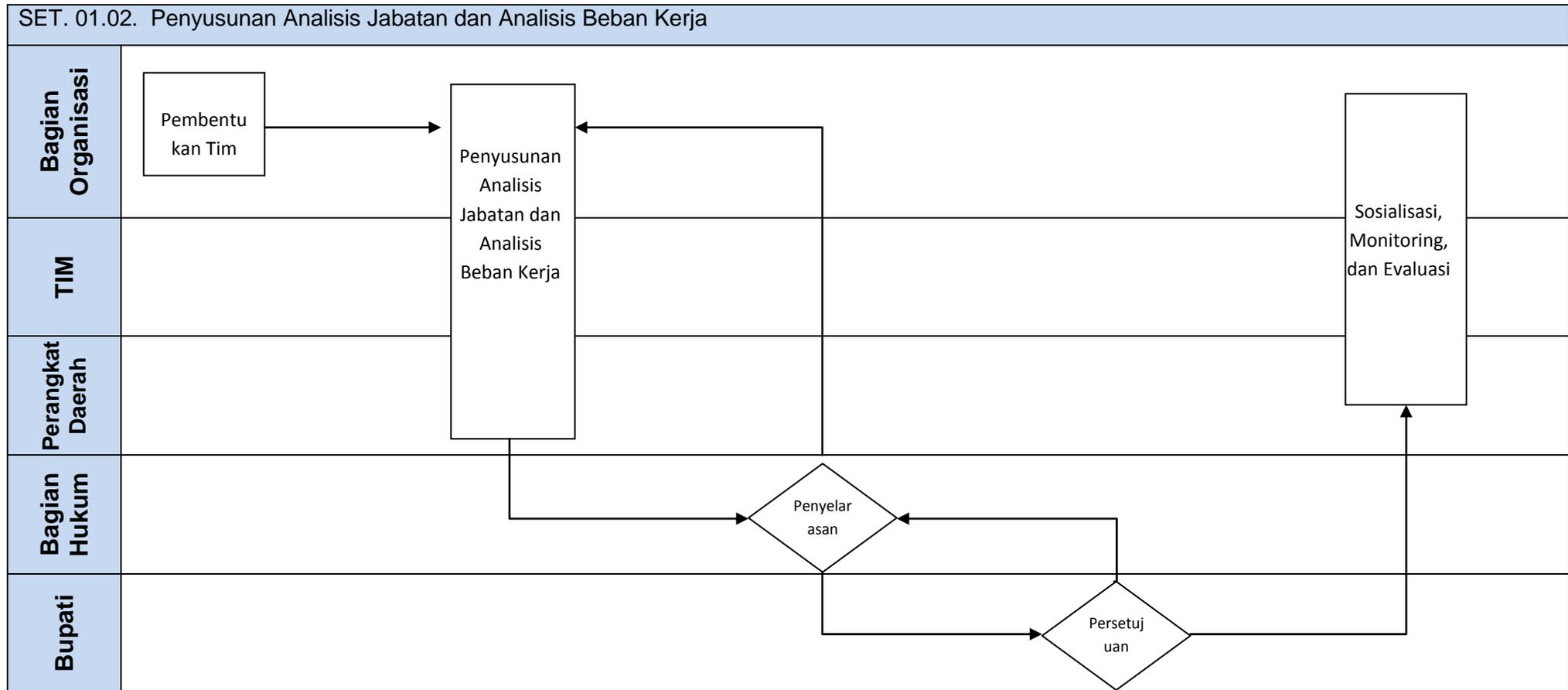
PETA SUB PROSES SET. 02
PETA SUB PROSES PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK



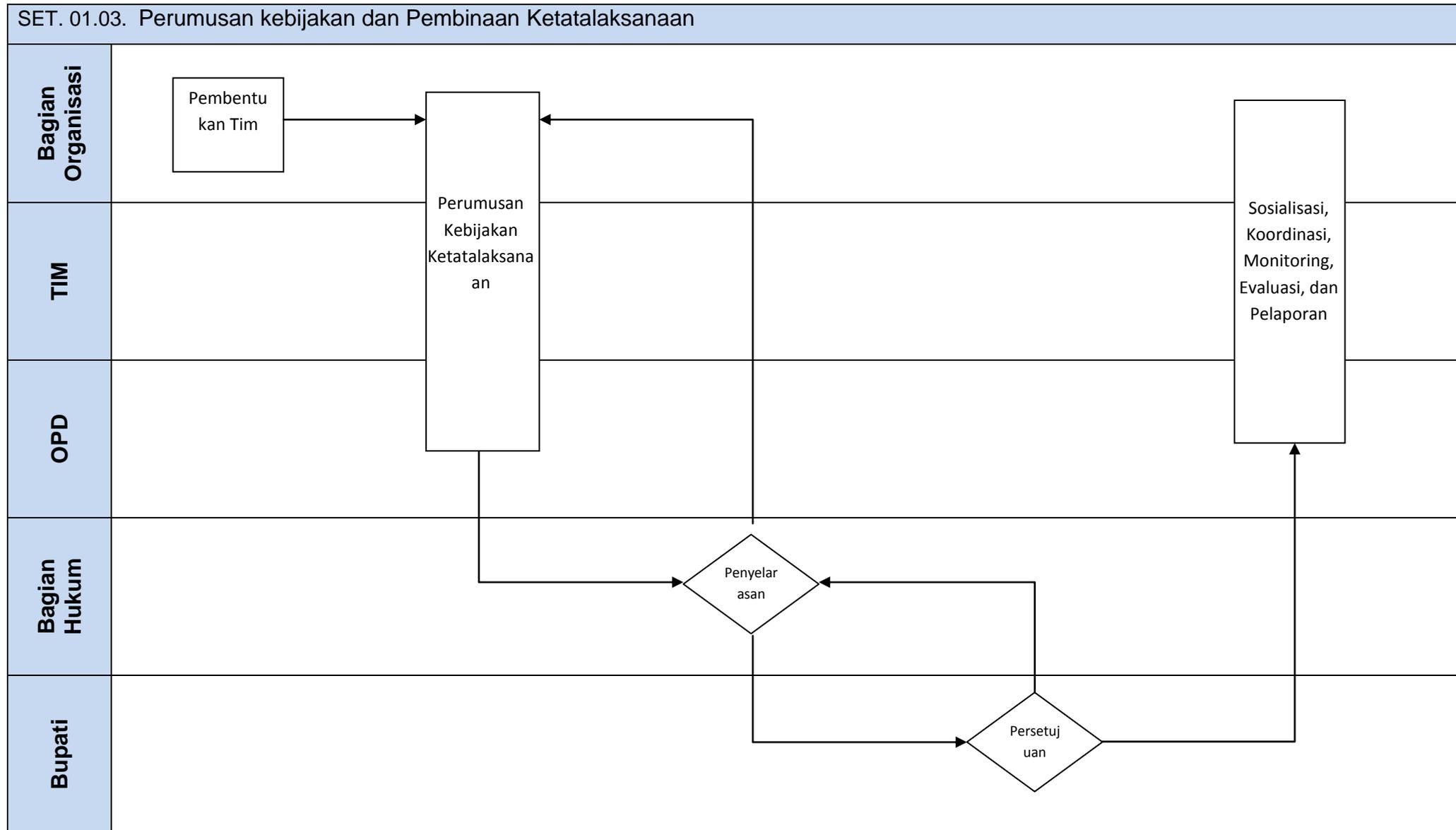
PETA LINTAS FUNGSI SET. 01.01



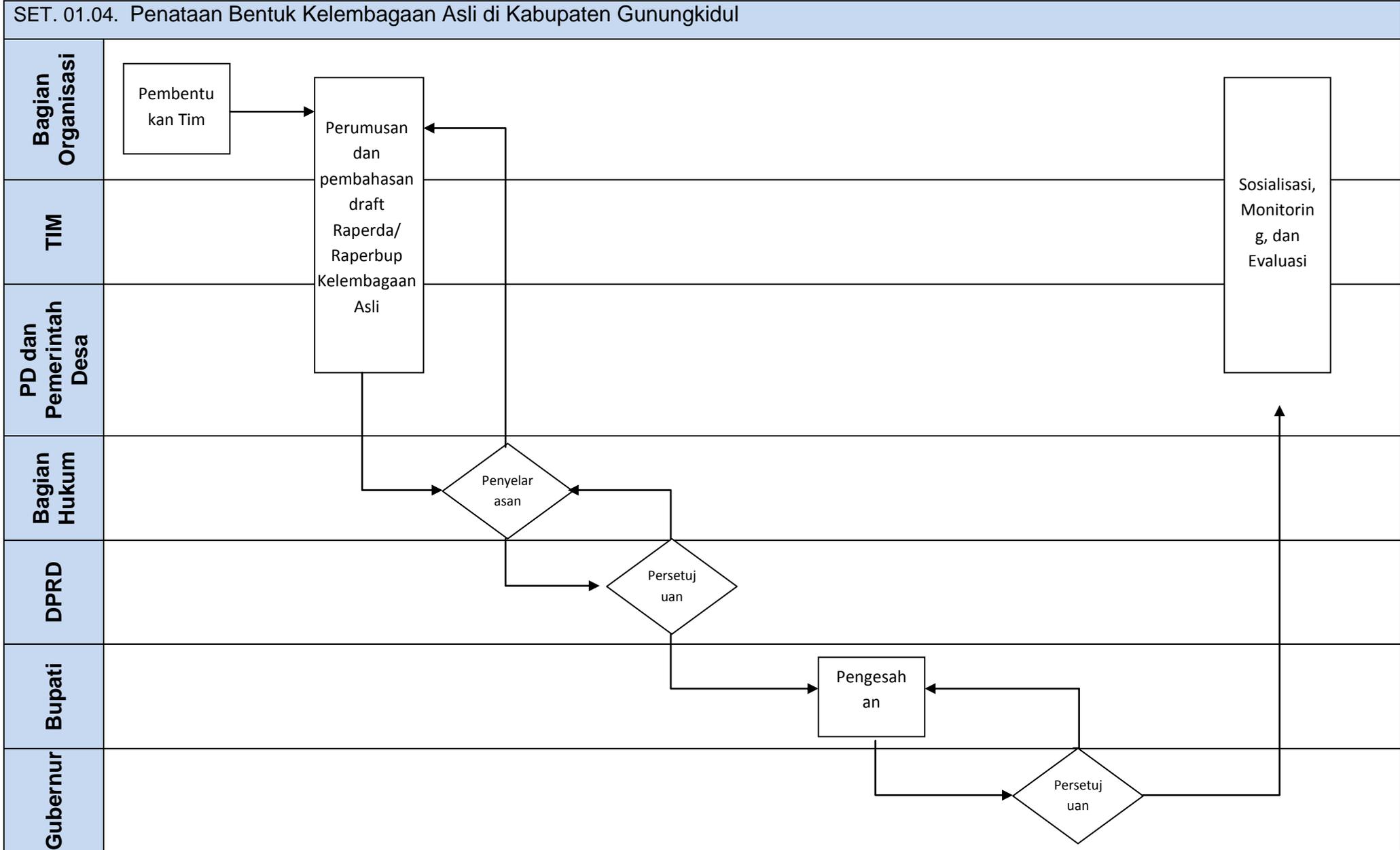
PETA LINTAS FUNGSI SET. 01.02



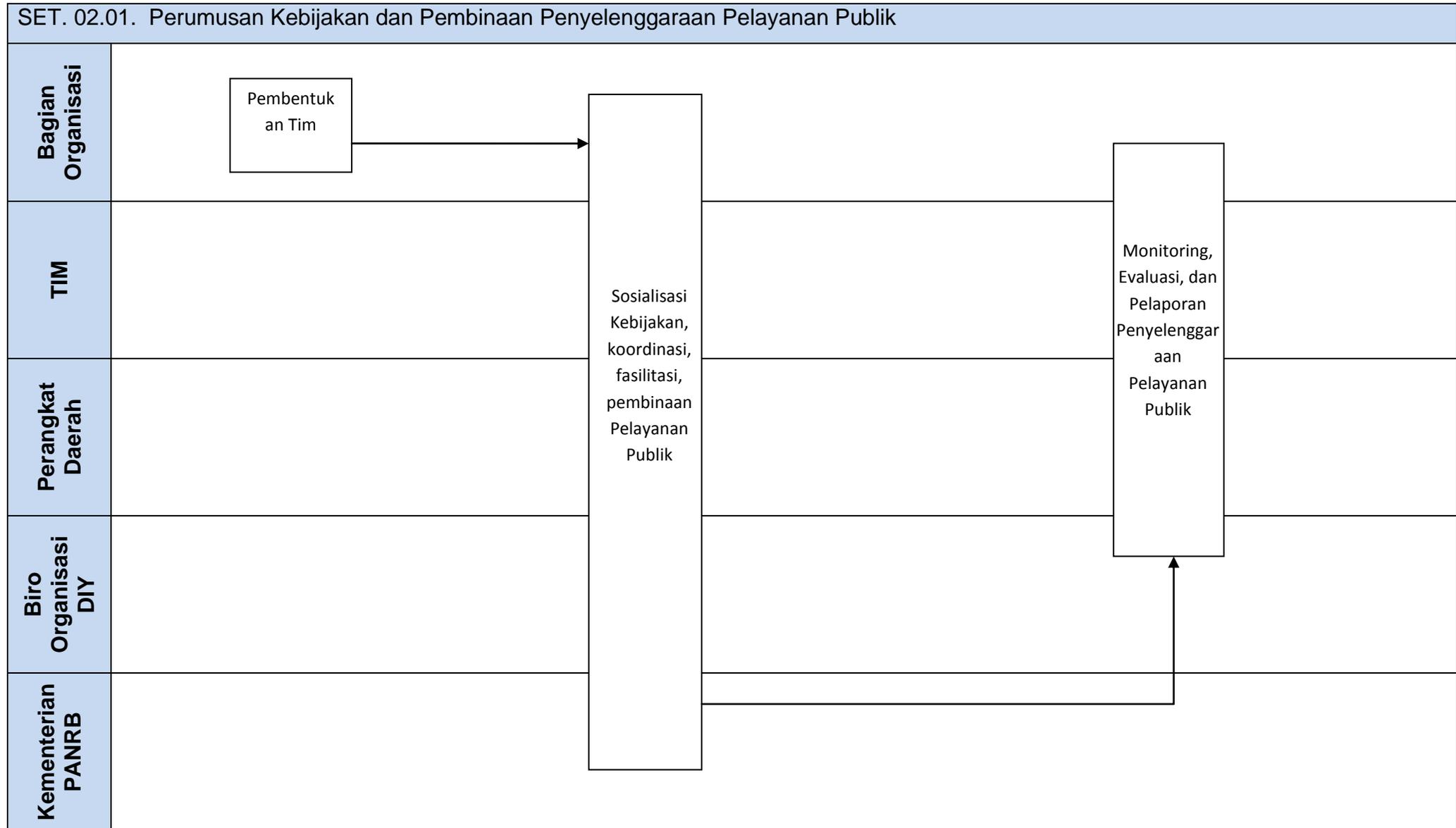
PETA LINTAS FUNGSI SET. 01.03



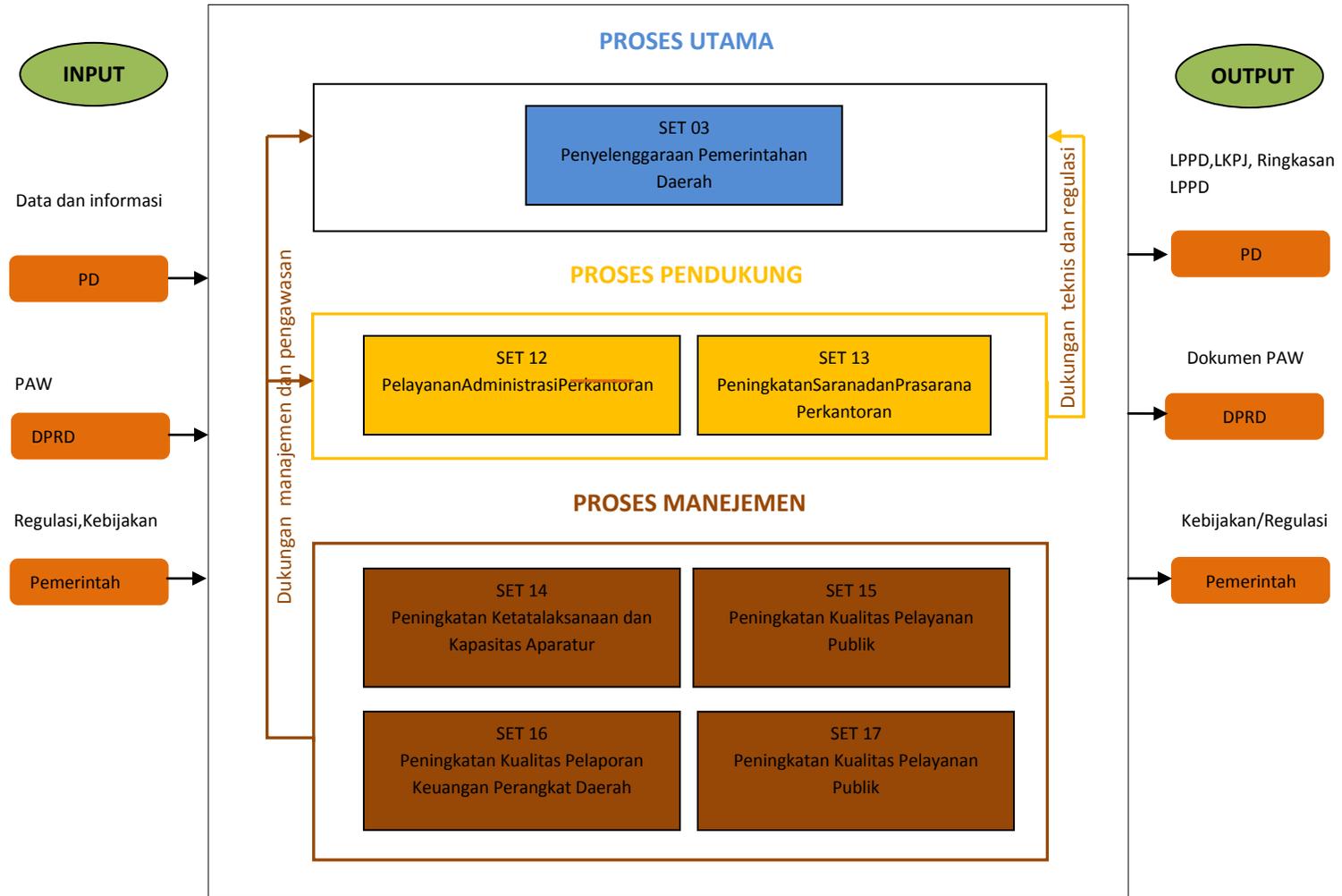
PETA LINTAS FUNGSI SET. 01.04



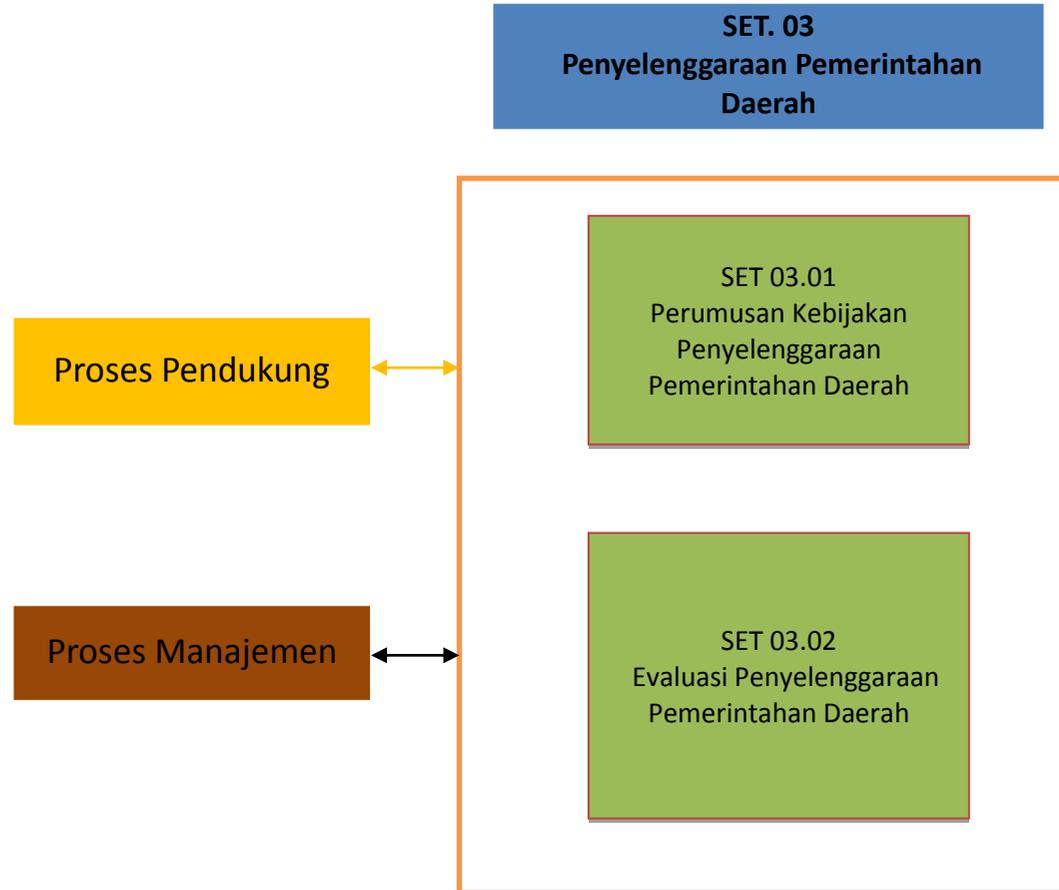
PETA LINTAS FUNGSI SET. 02.01



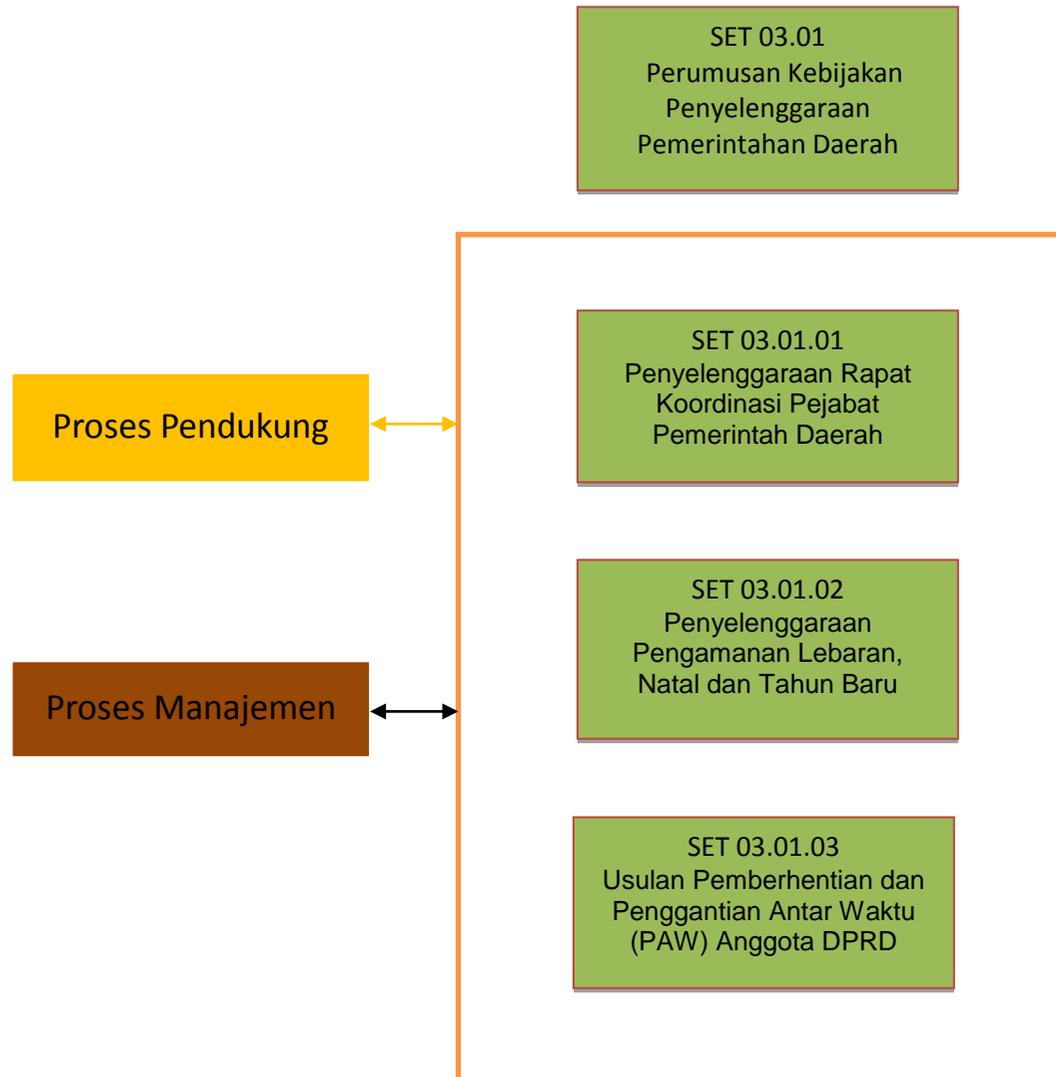
PETA PROSES BISNIS
SASARAN 4
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENINGKAT



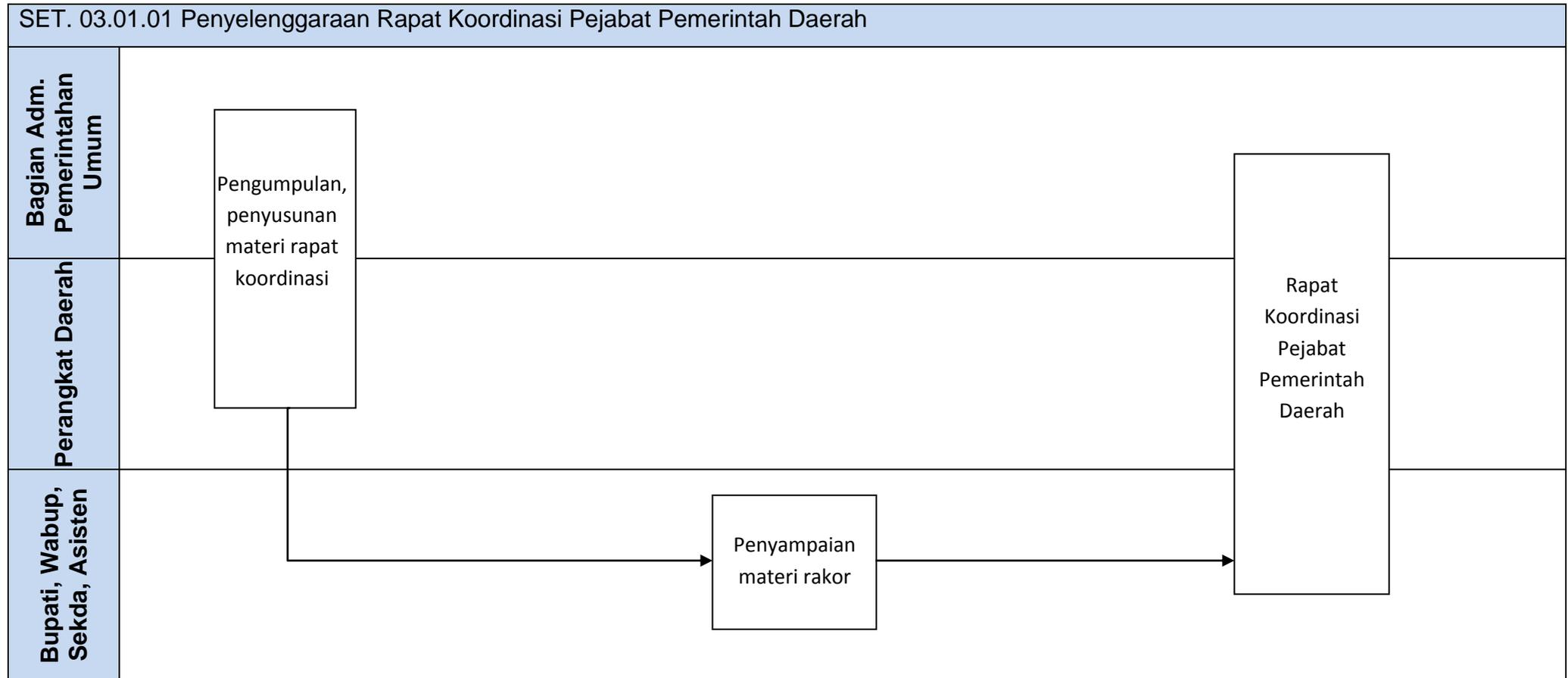
**PETA SUB PROSES SET. 03
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**



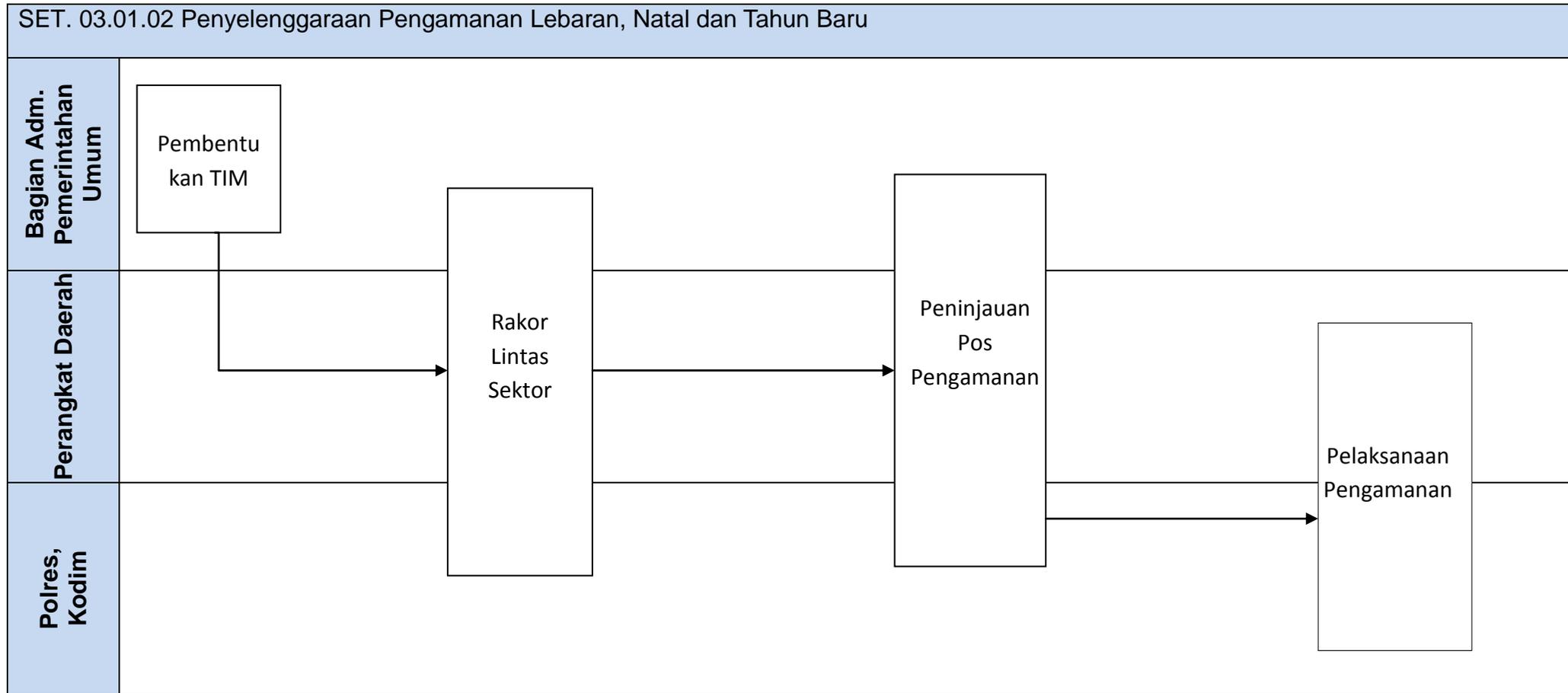
**PETA SUB SUB PROSES SET. 03.01
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**



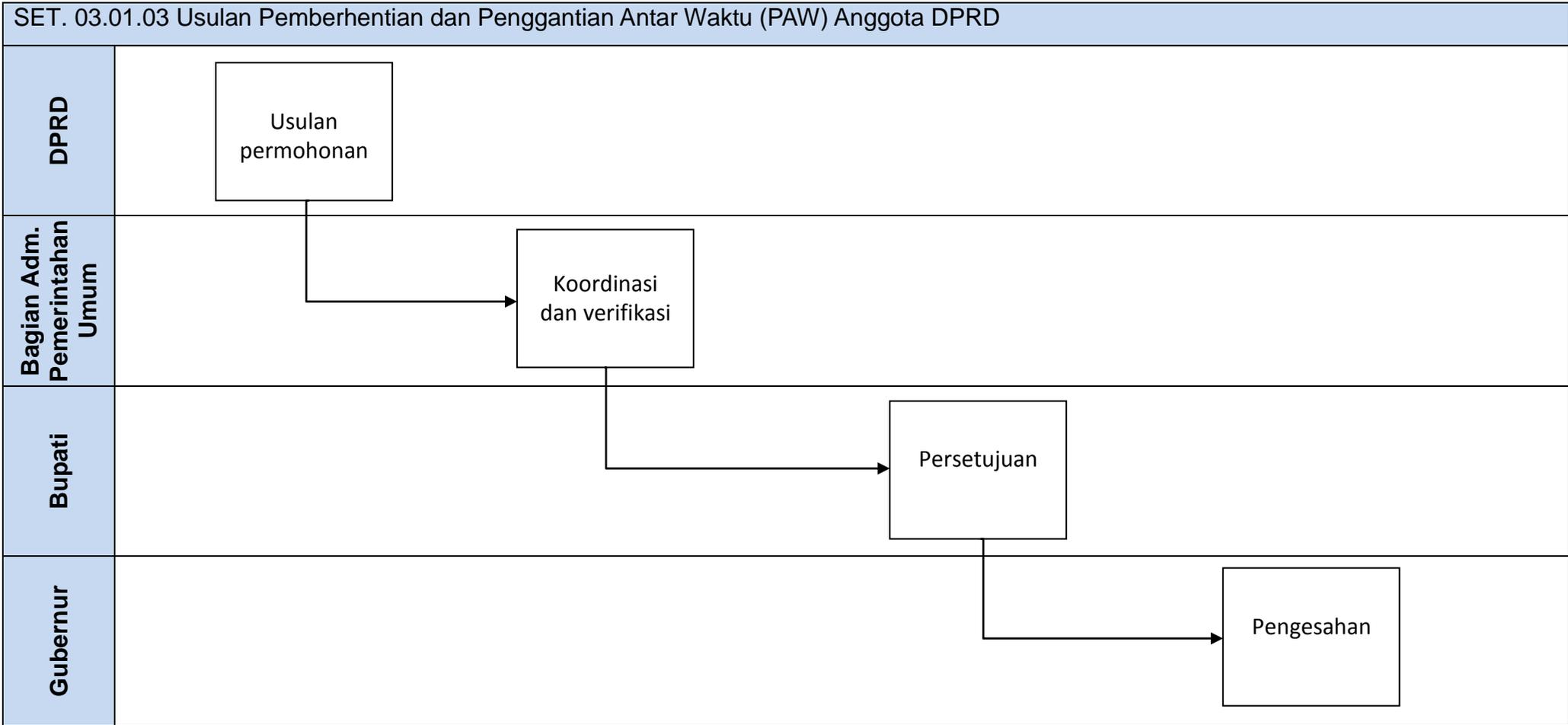
PETA LINTAS FUNGSI 03.01.01
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH



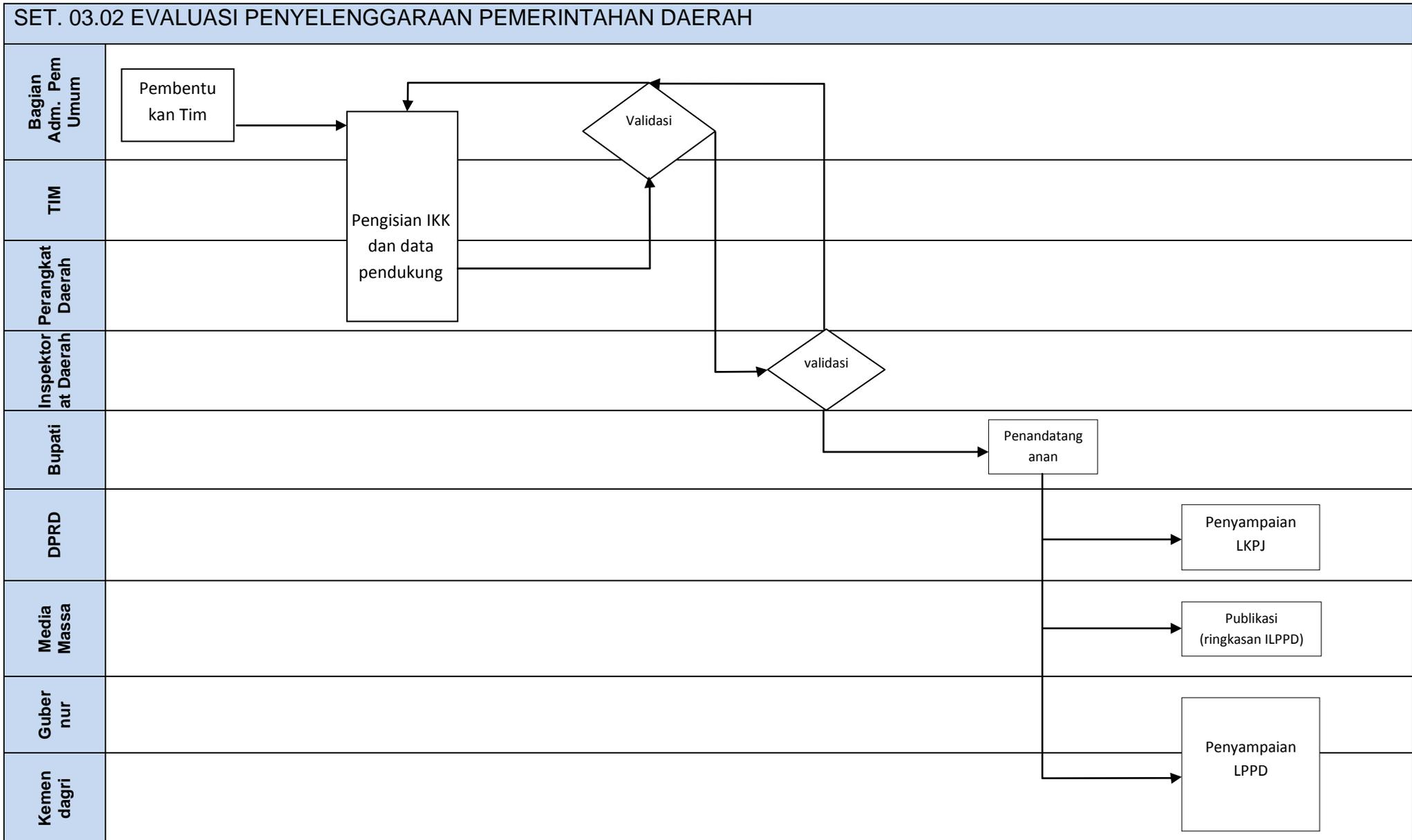
PETA LINTAS FUNGSI 03.01.02
PENYELENGGARAAN PENGAMANAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU



PETA LINTAS FUNGSI 03.01.03



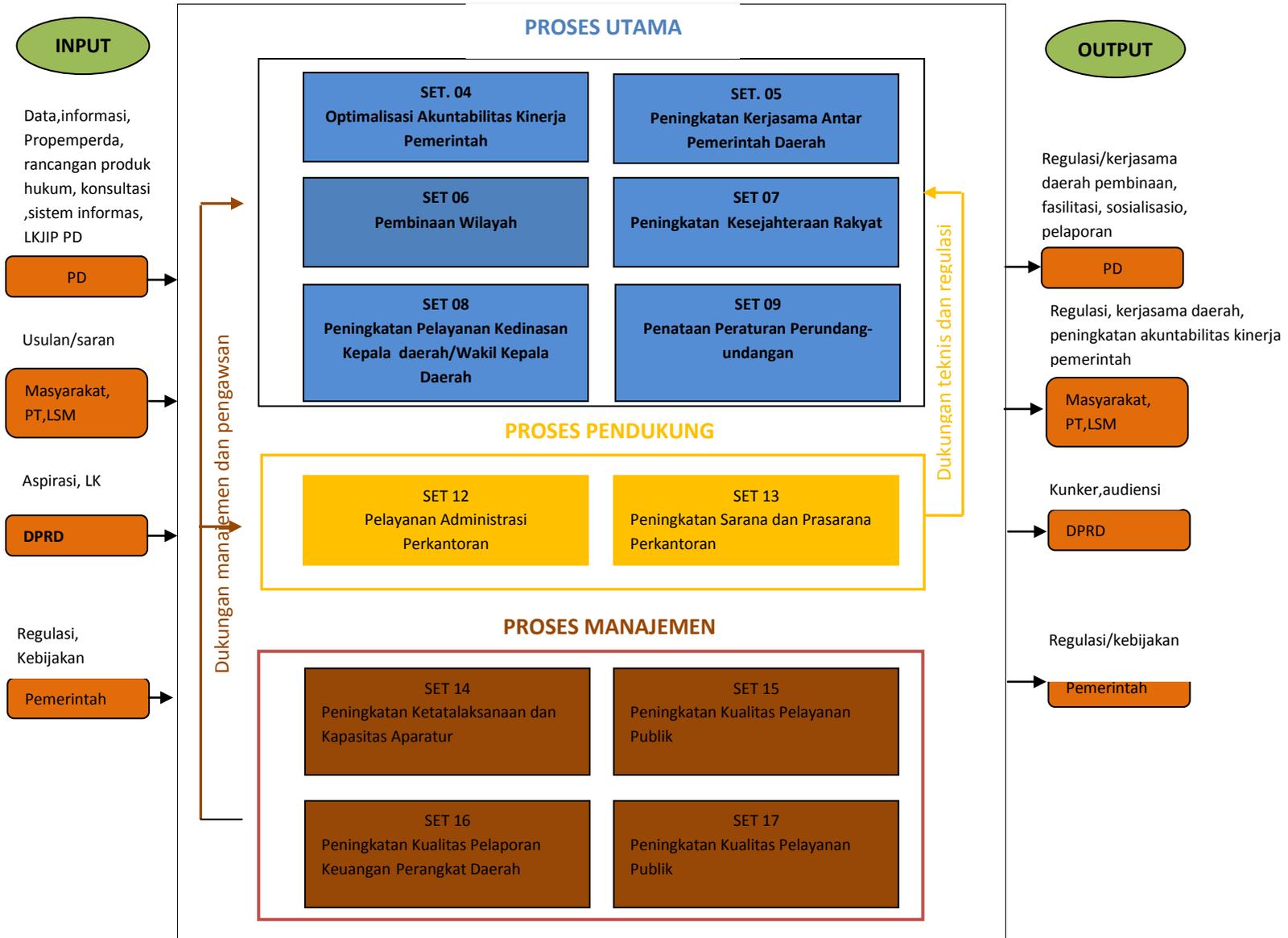
**PETA LINTAS FUNGSI 03.02
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**



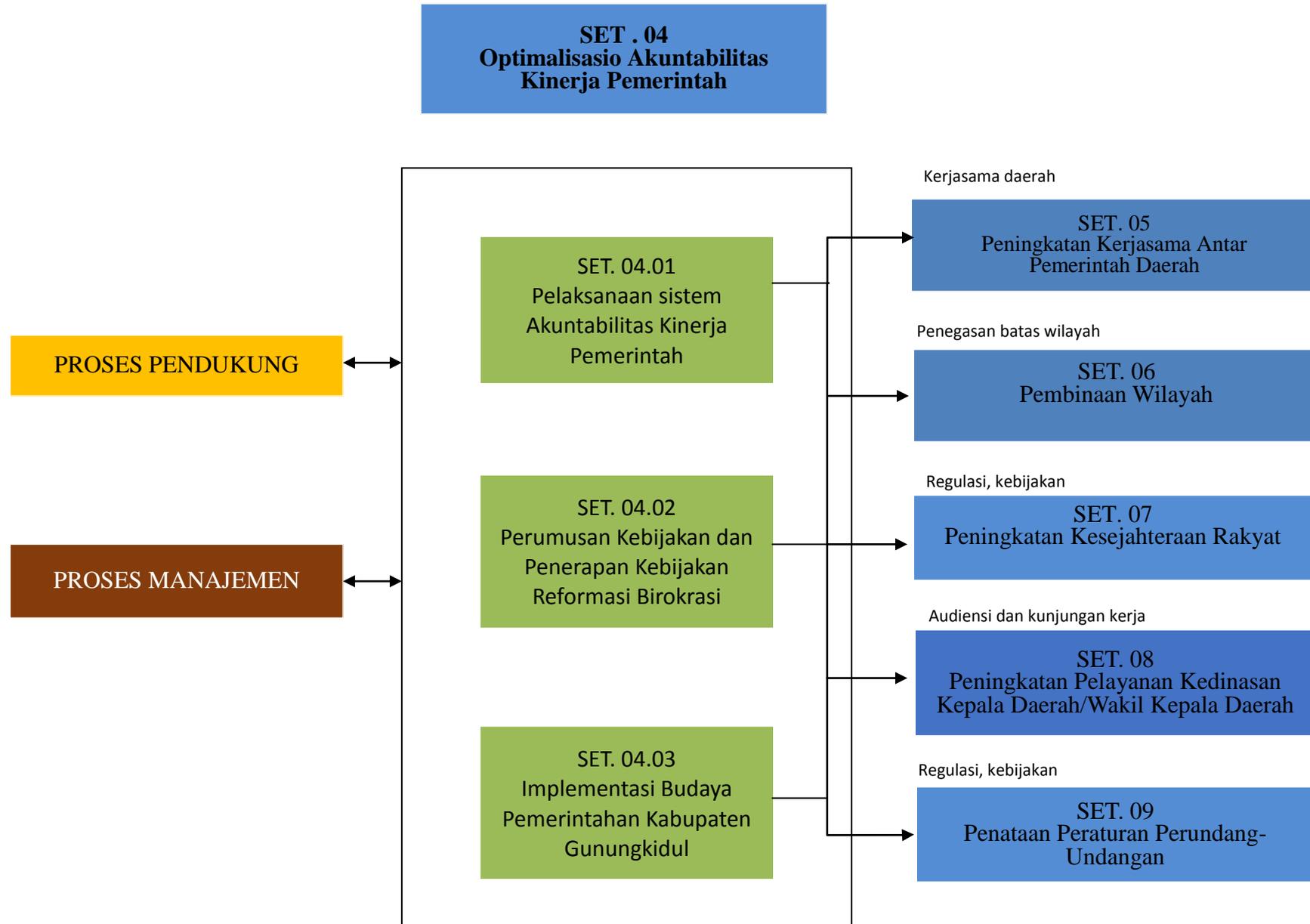
PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN 5

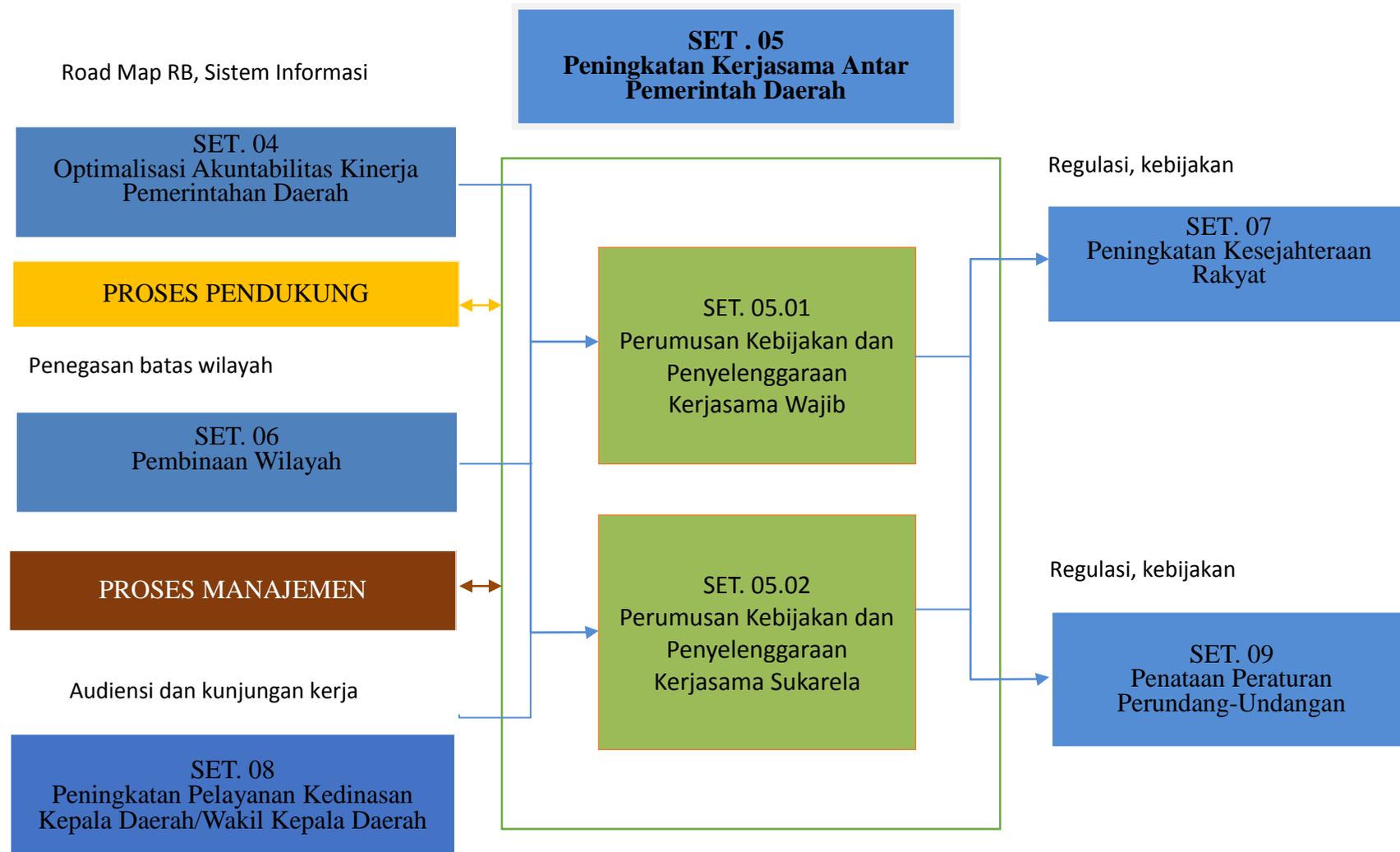
NILAI AKIP PEMERINTAH DAERAH MENINGKAT



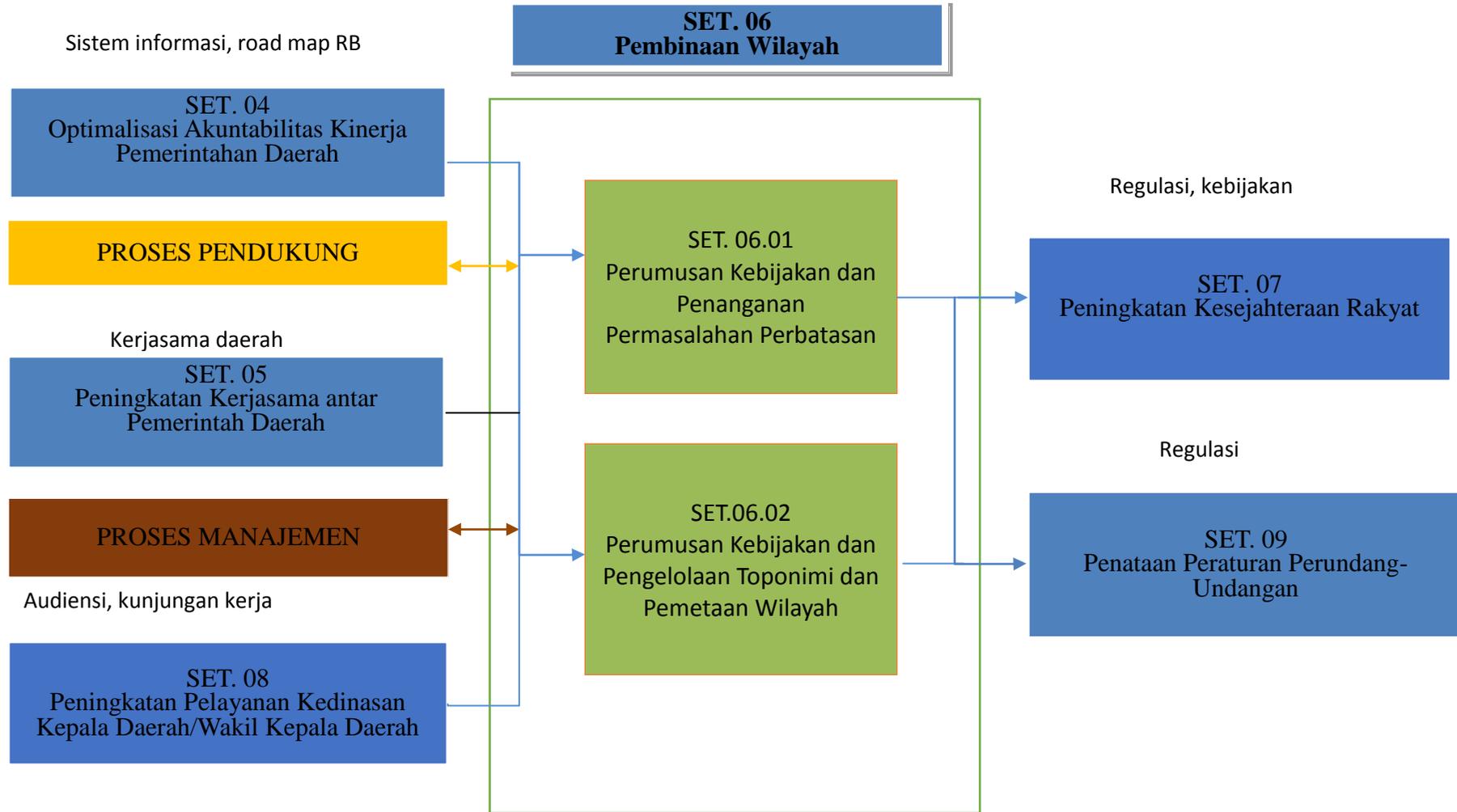
**PETA SUB PROSES SET. 04
OPTIMALISASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH**



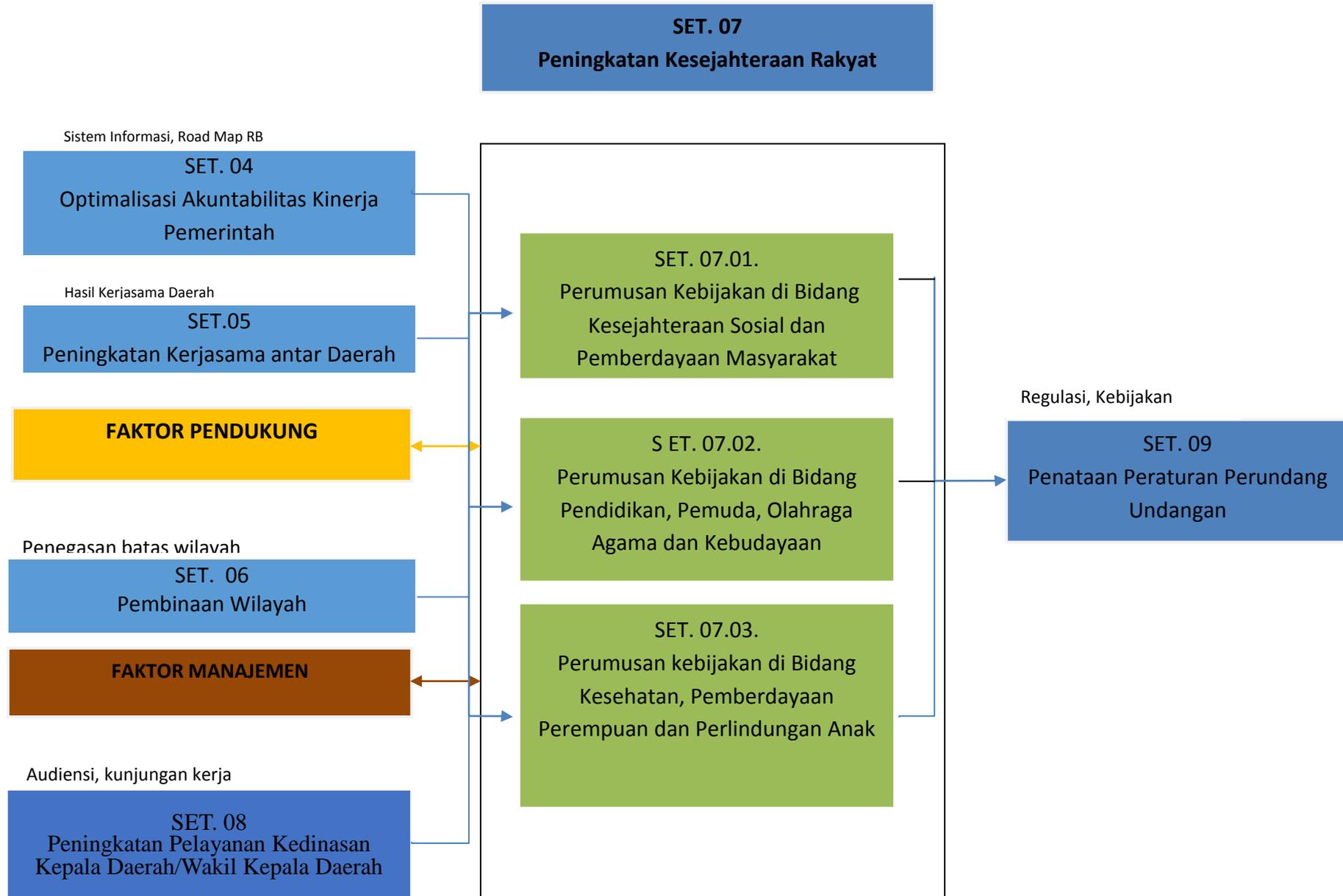
**PETA SUB PROSES SET. 05
PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH**



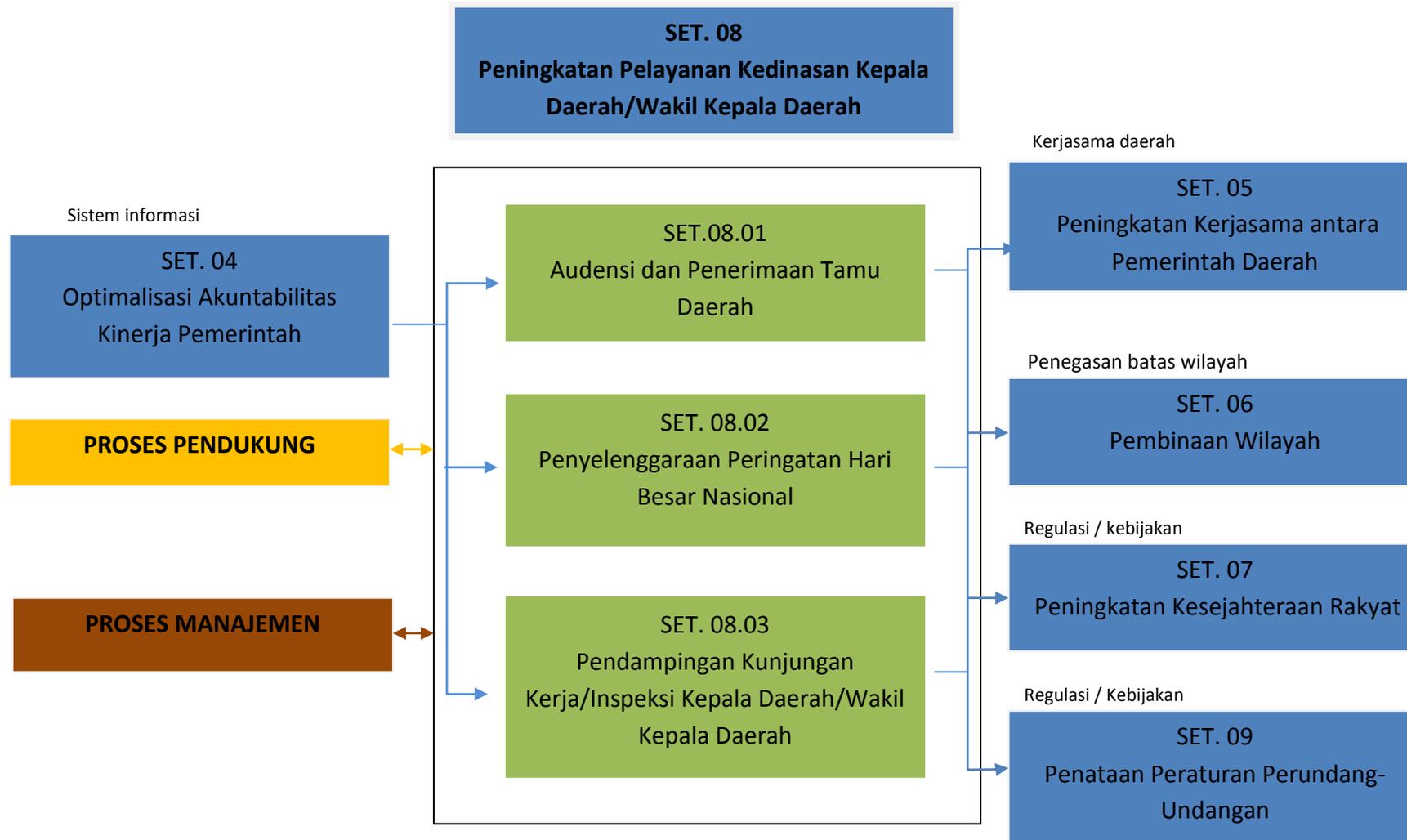
**PETA SUB PROSES SET. 06
PEMBINAAN WILAYAH**



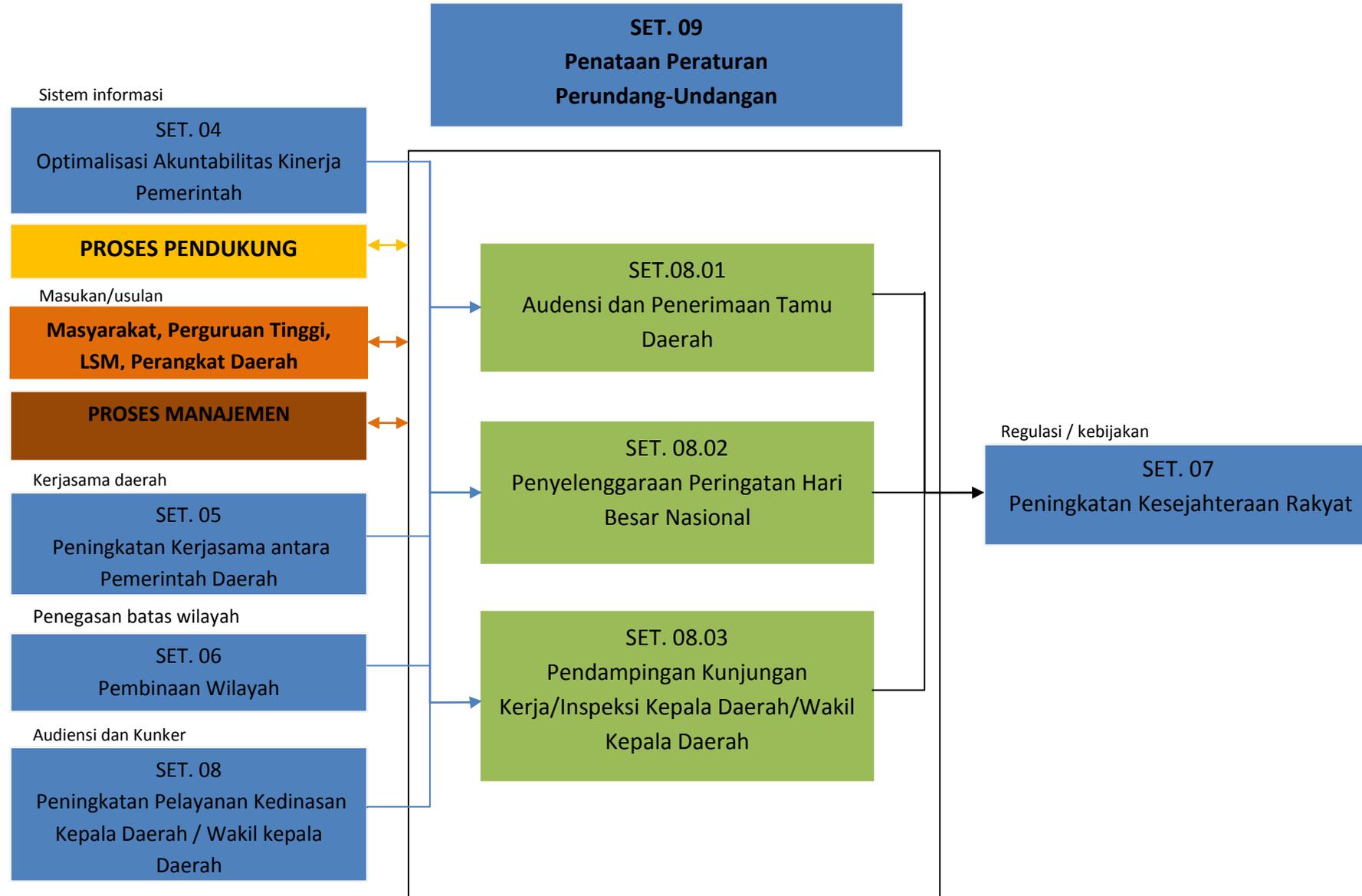
PETA SUB PROSES SET. 07 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



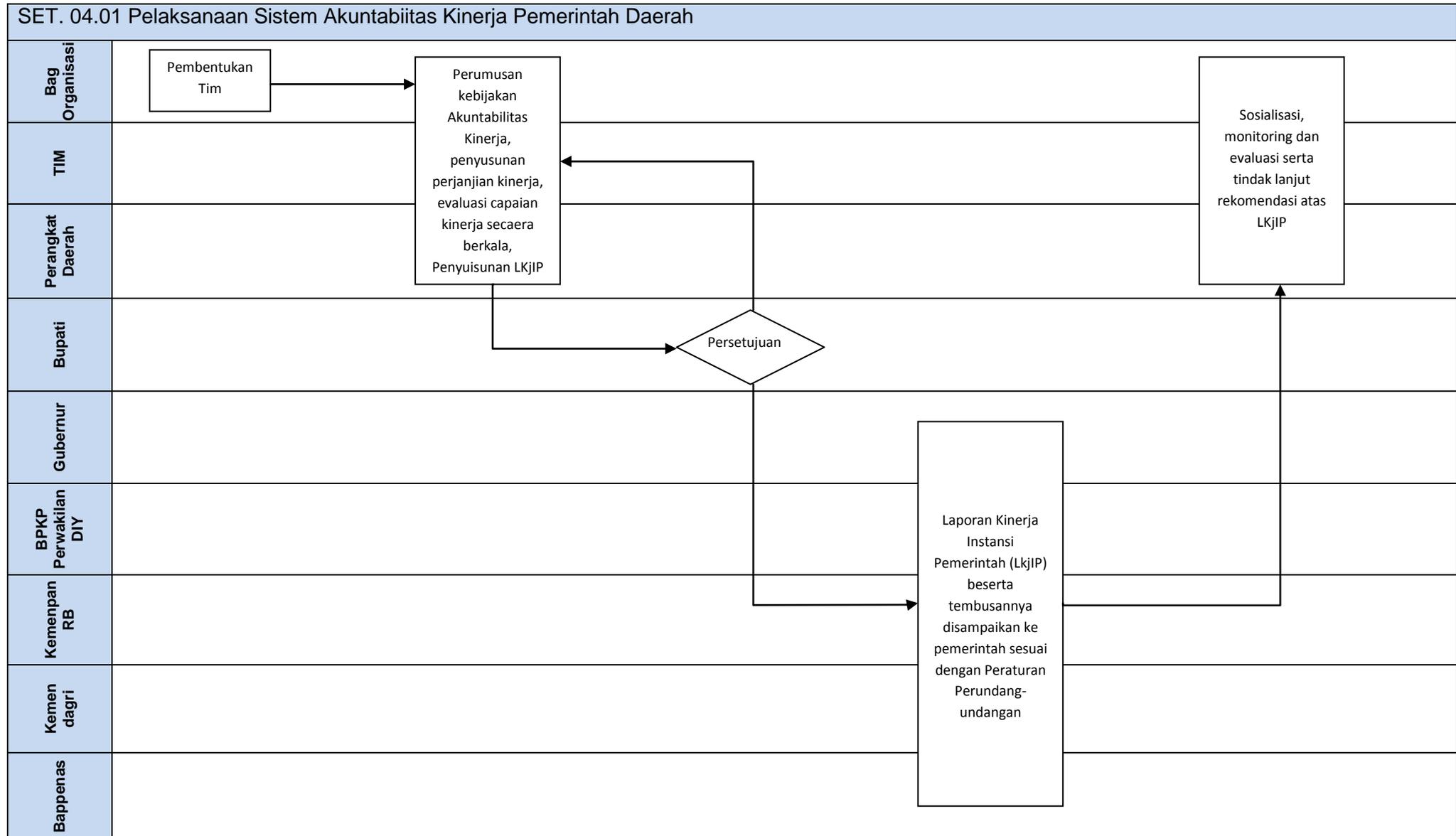
**PETA SUB PROSES SET. 08
PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH**



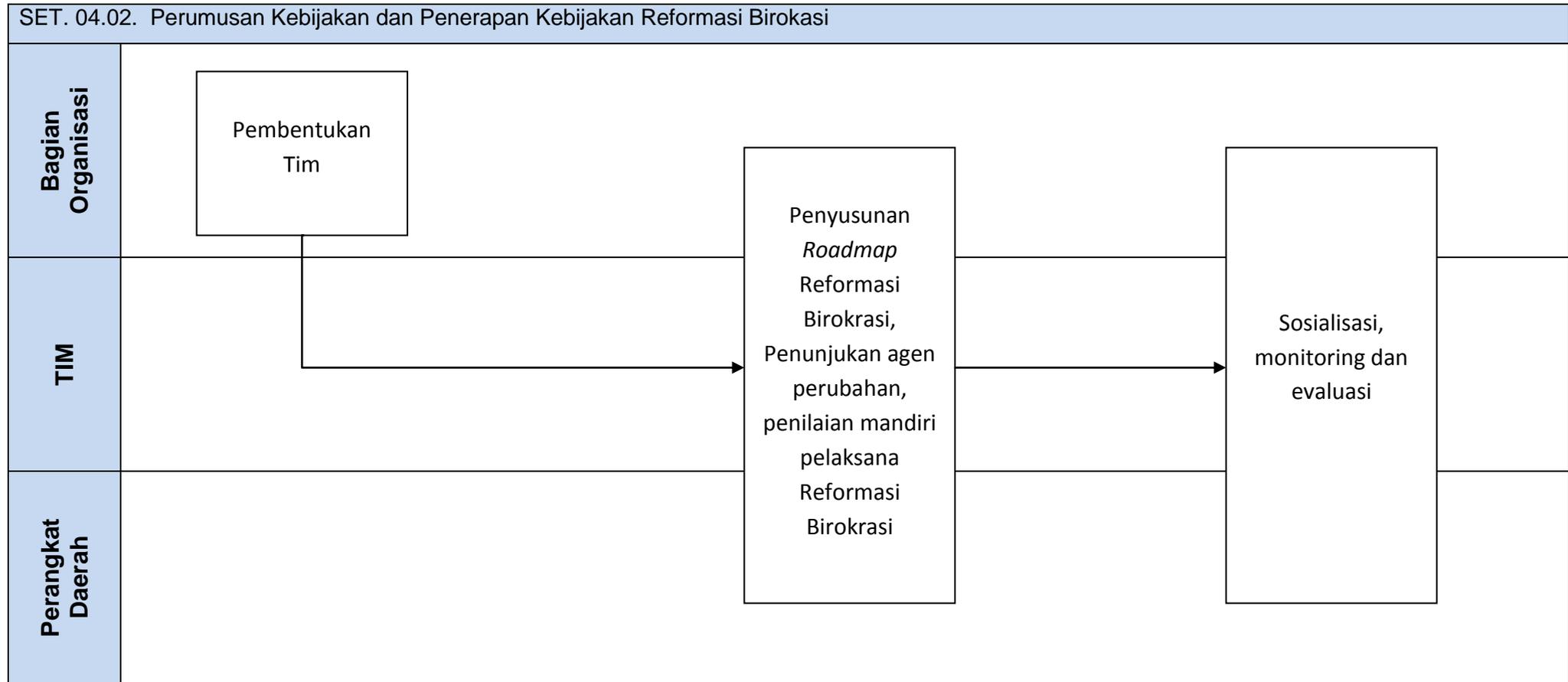
PETA SUB PROSES SET. 09 PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



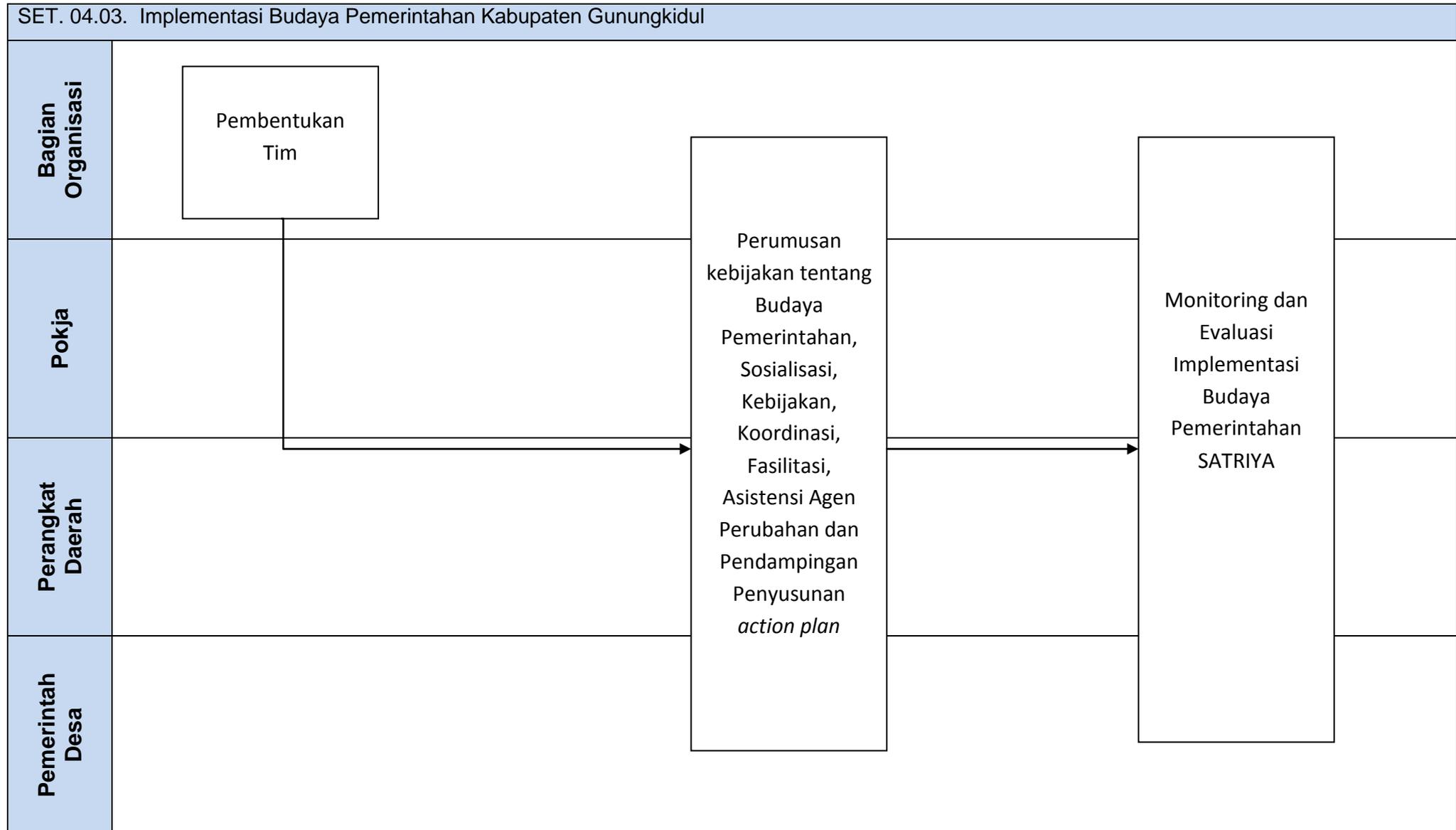
**PETA LINTAS FUNGSI SET.04.01
PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH**



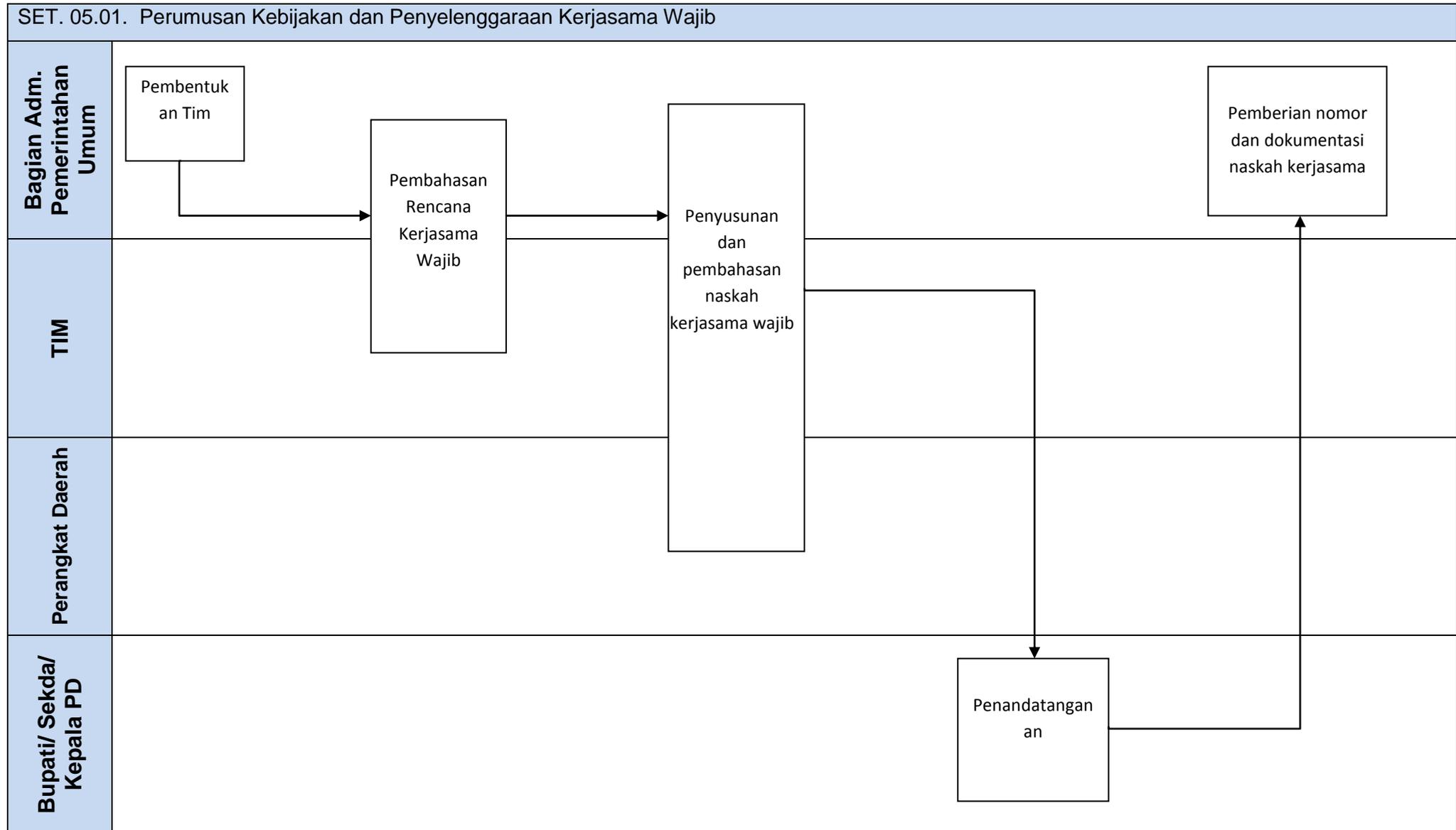
**PETA LINTAS FUNGSI SET.04.02
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI**



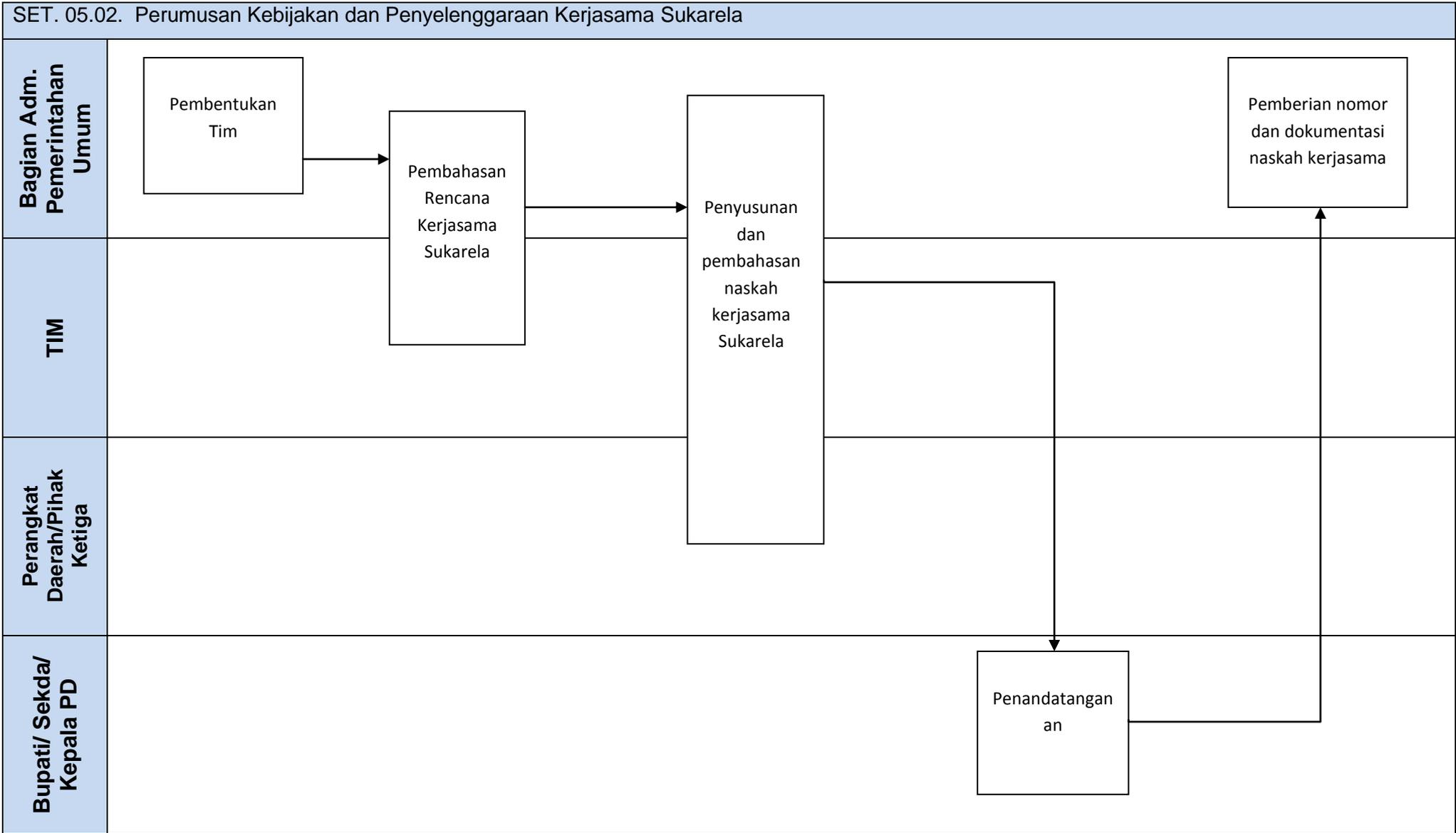
**PETA LINTAS FUNGSI SET.04.03
IMPLEMENTASI BUDAYA PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNGGIDUL**



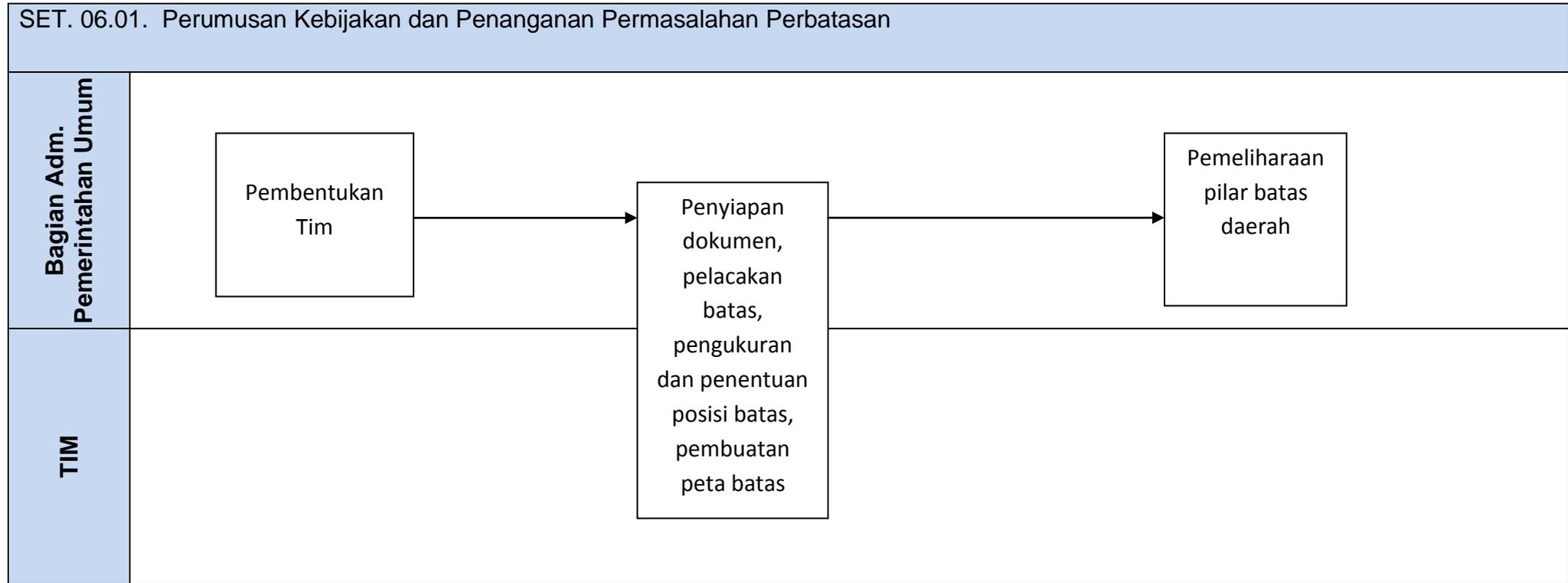
**PETA LINTAS FUNGSI SET.05.01
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA WAJIB**



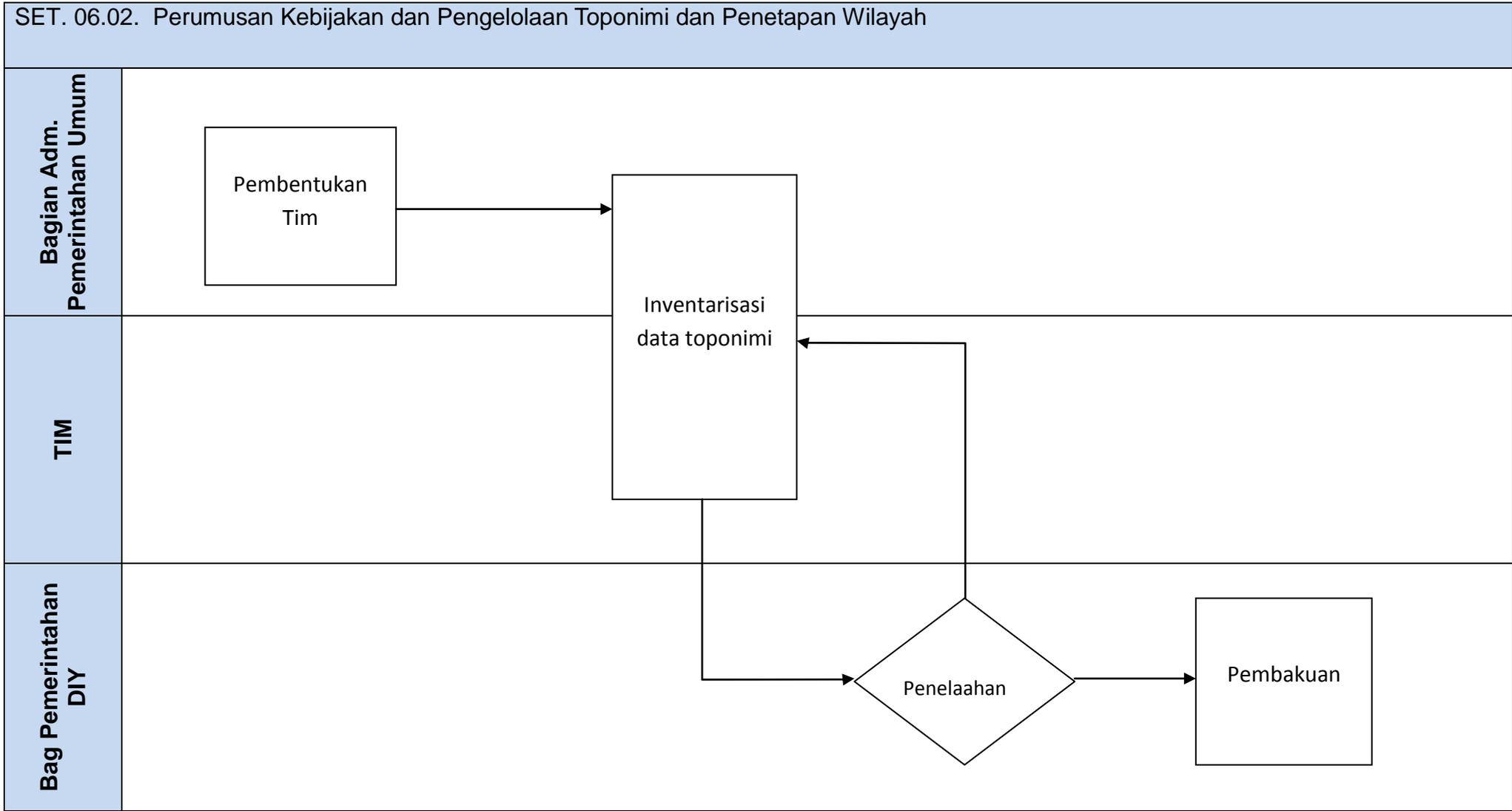
**PETA LINTAS FUNGSI SET.05.02
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA SUKARELA**



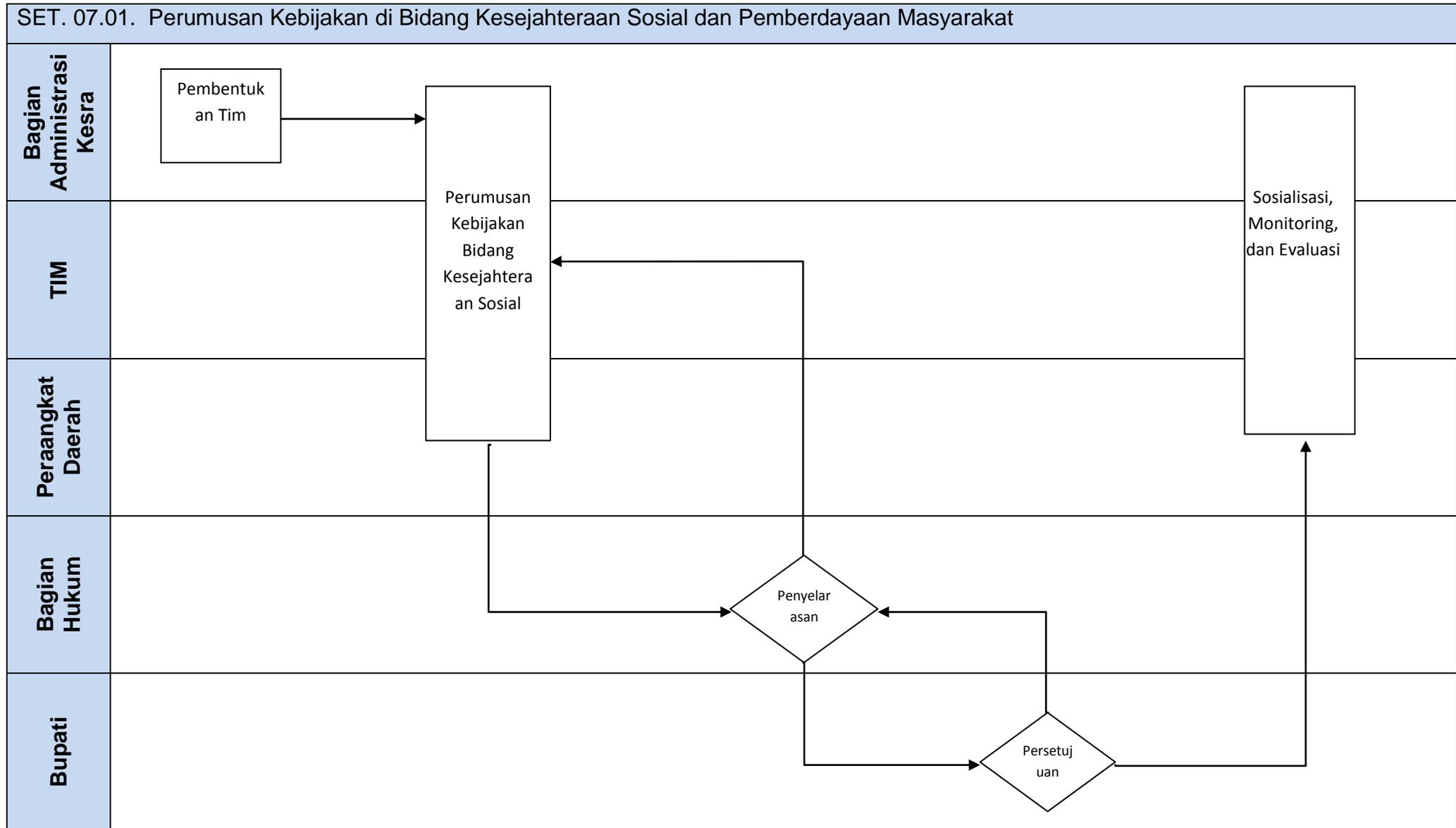
PETA LINTAS FUNGSI SET. 06.01
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PERBATASAN



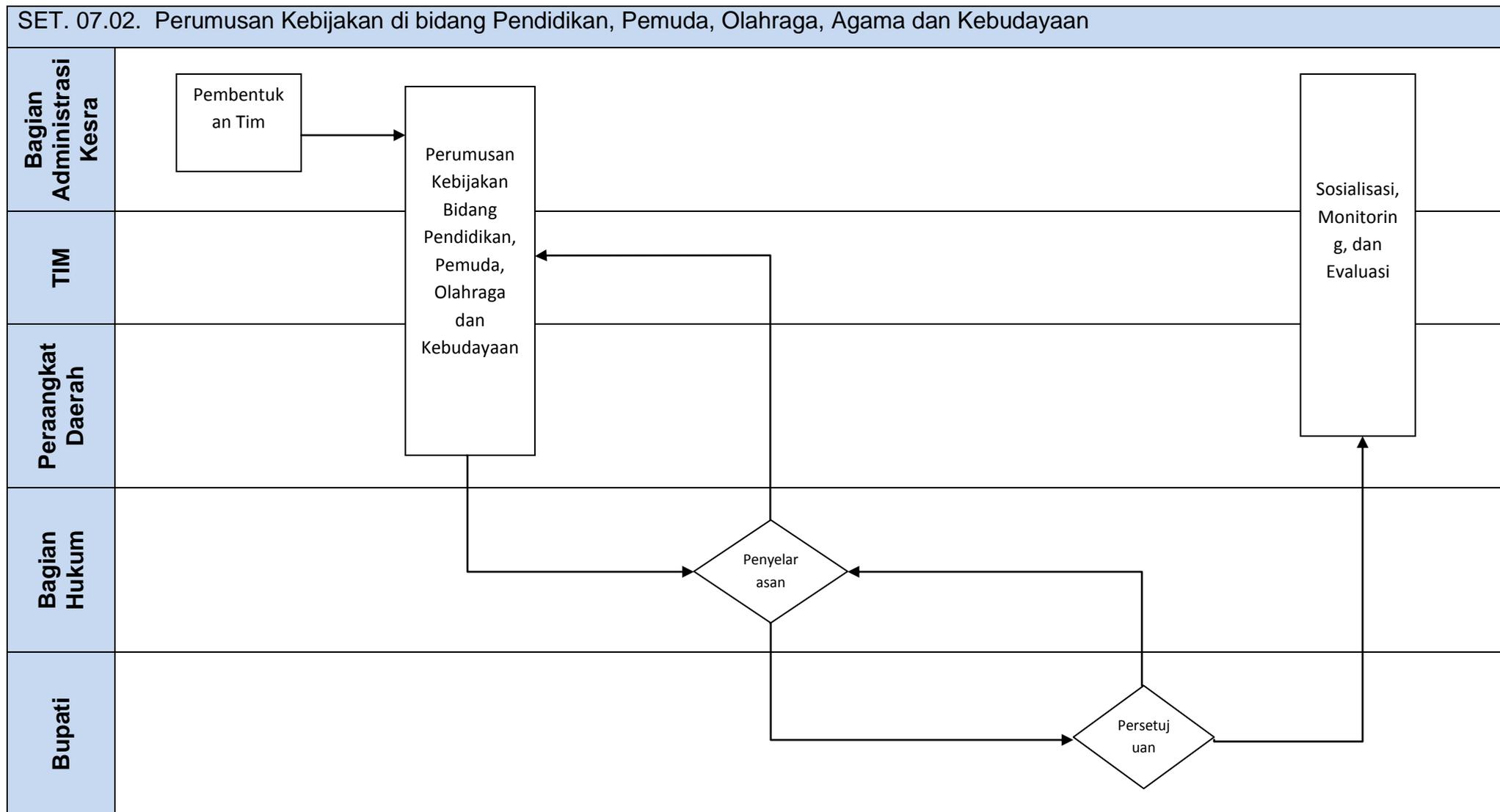
PETA LINTAS FUNGSI SET. 06.02
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN TOPONIMI DAN PENETAPAN WILAYAH



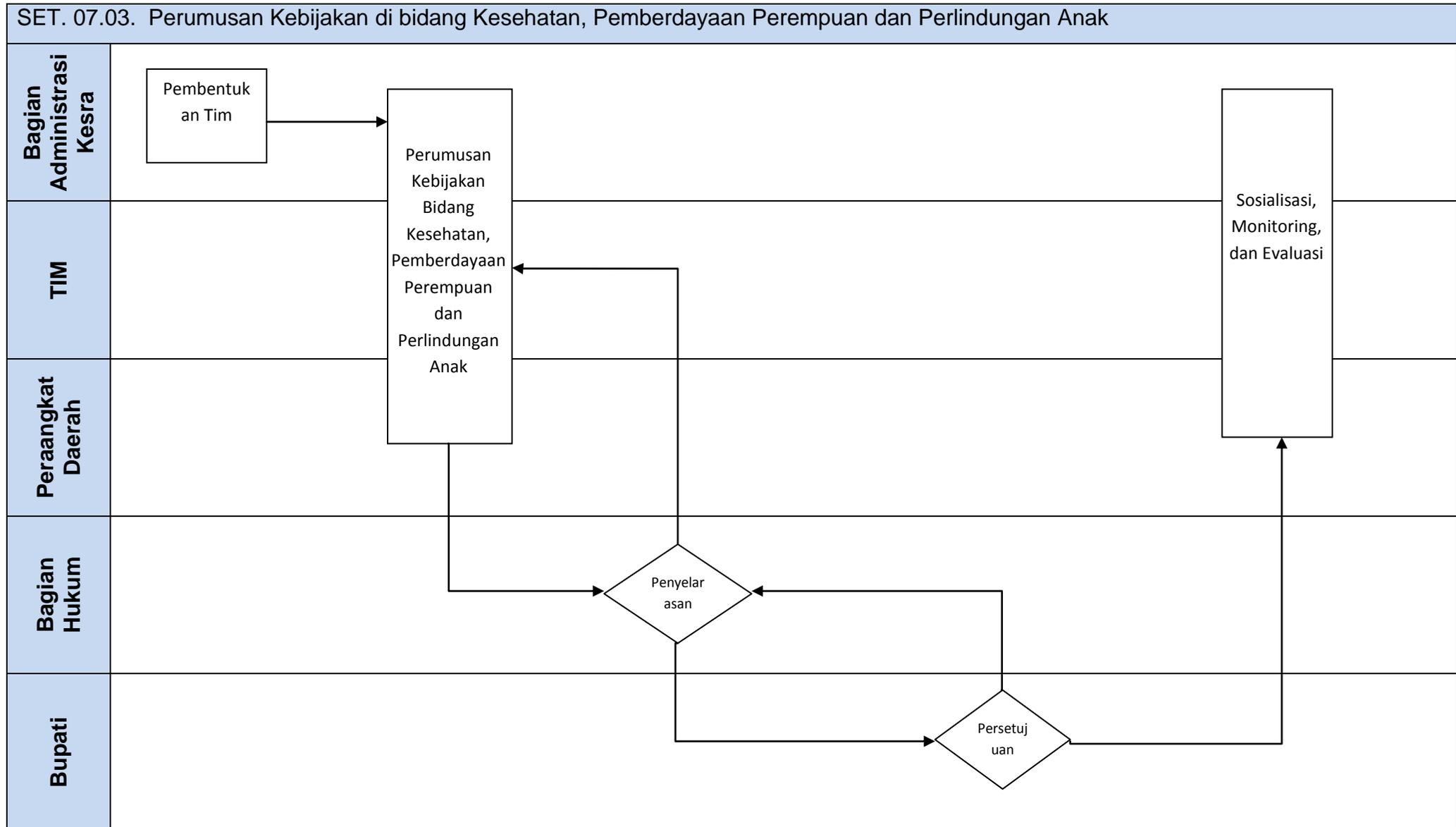
PETA LINTAS FUNGSI SET.07.01
PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



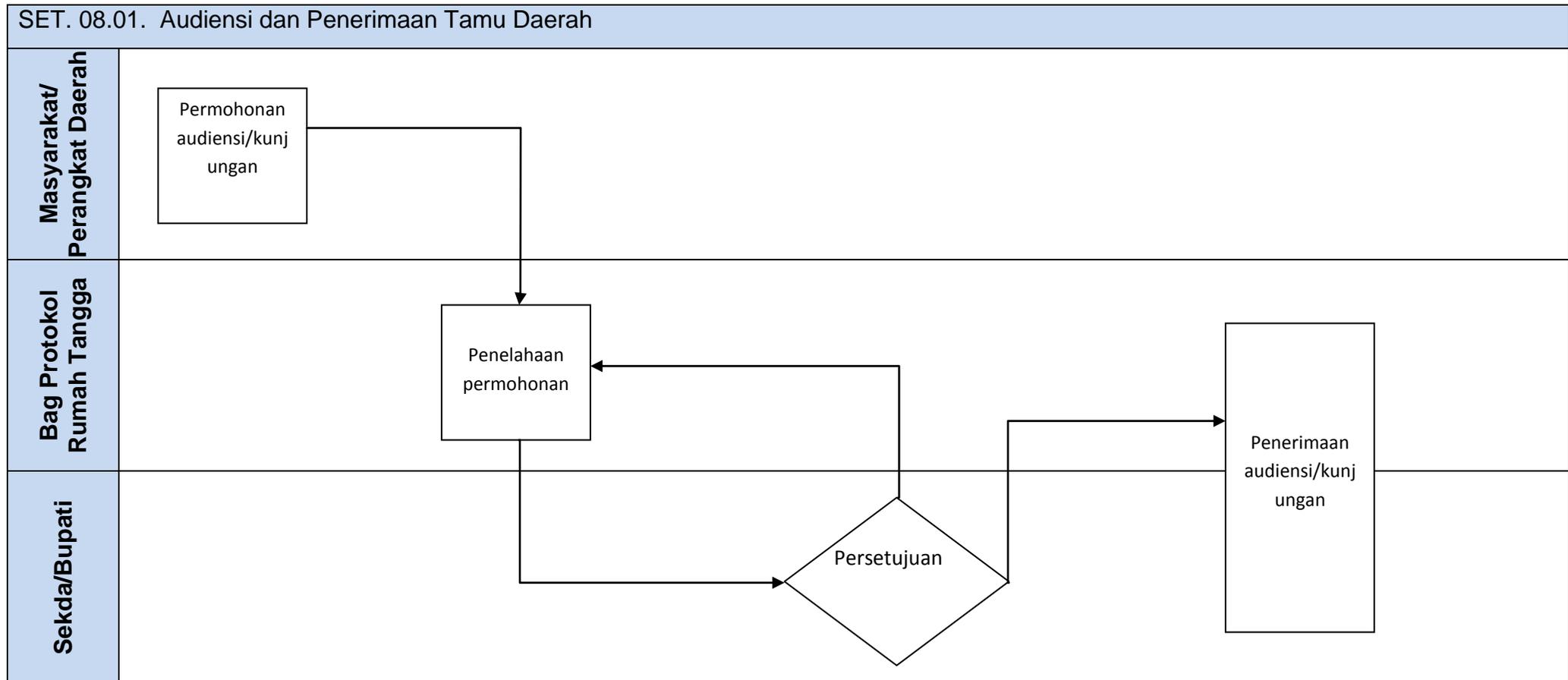
PETA LINTAS FUNGSI SET. 07.02
PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, AGAMA DAN KEBUDAYAAN



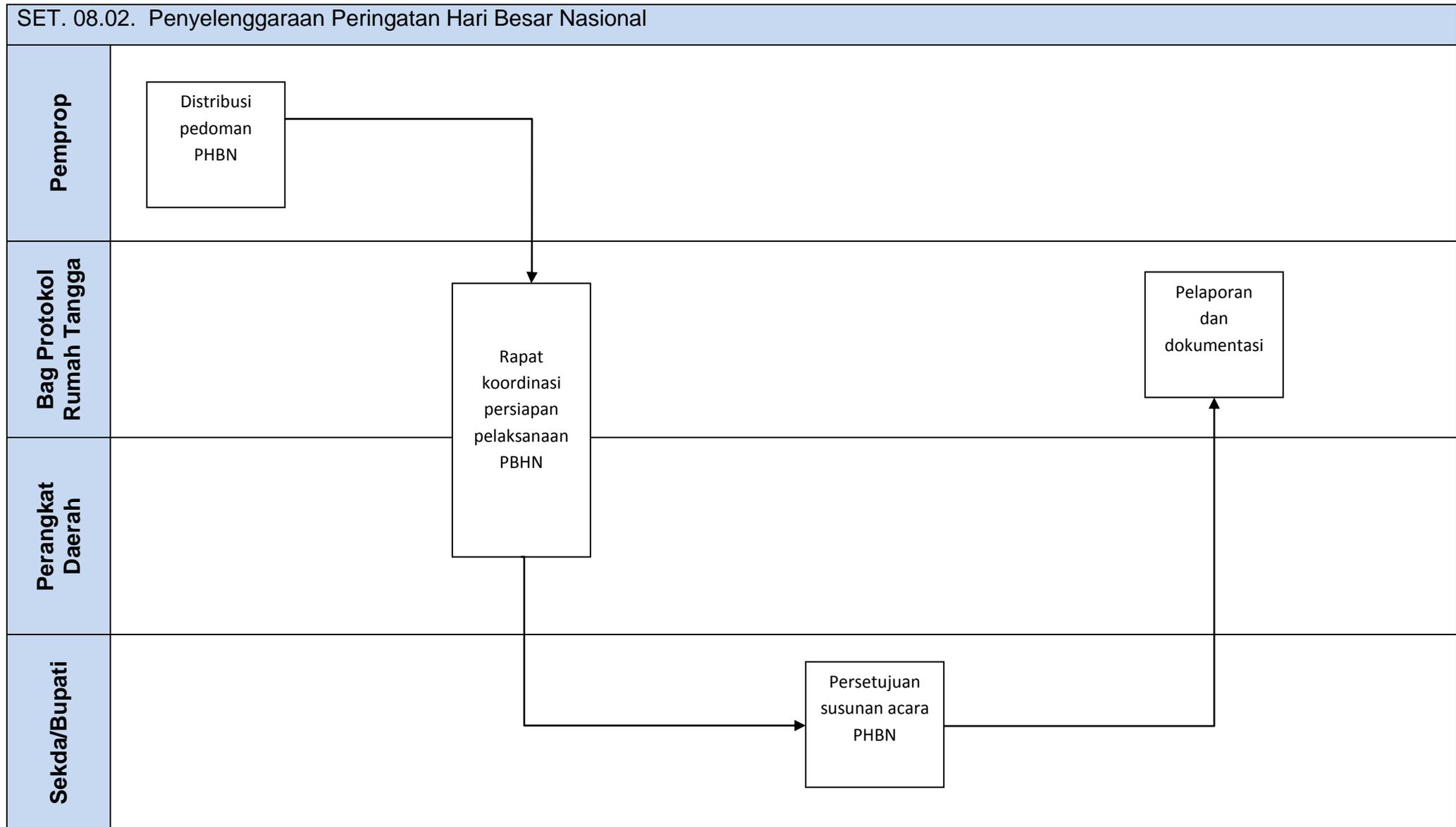
PETA LINTAS FUNGSI SET. 07.03
PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



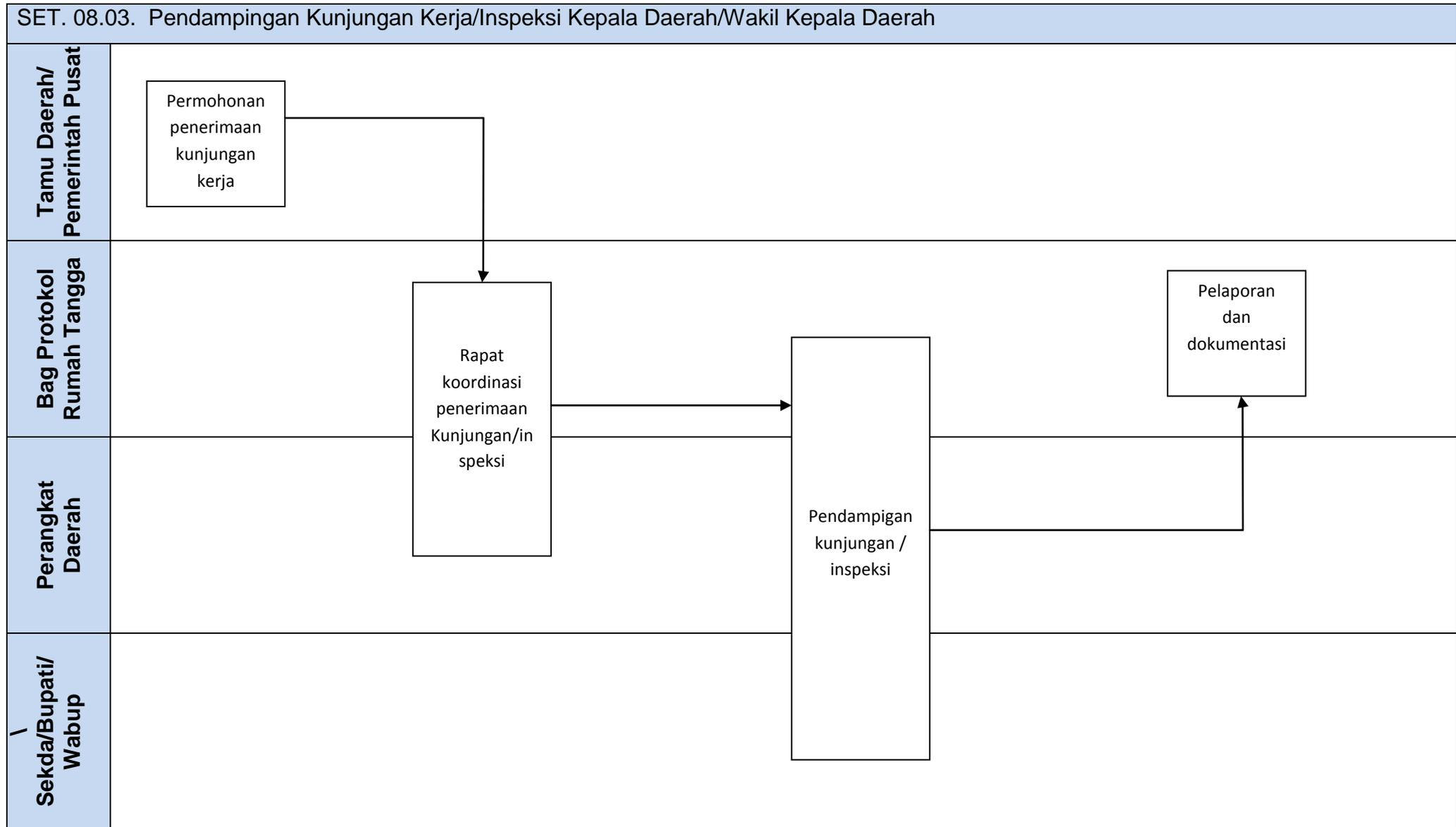
PETA LINTAS FUNGSI SET. 08.01
AUDIENSI DAN PENERIMAAN TAMU DAERAH



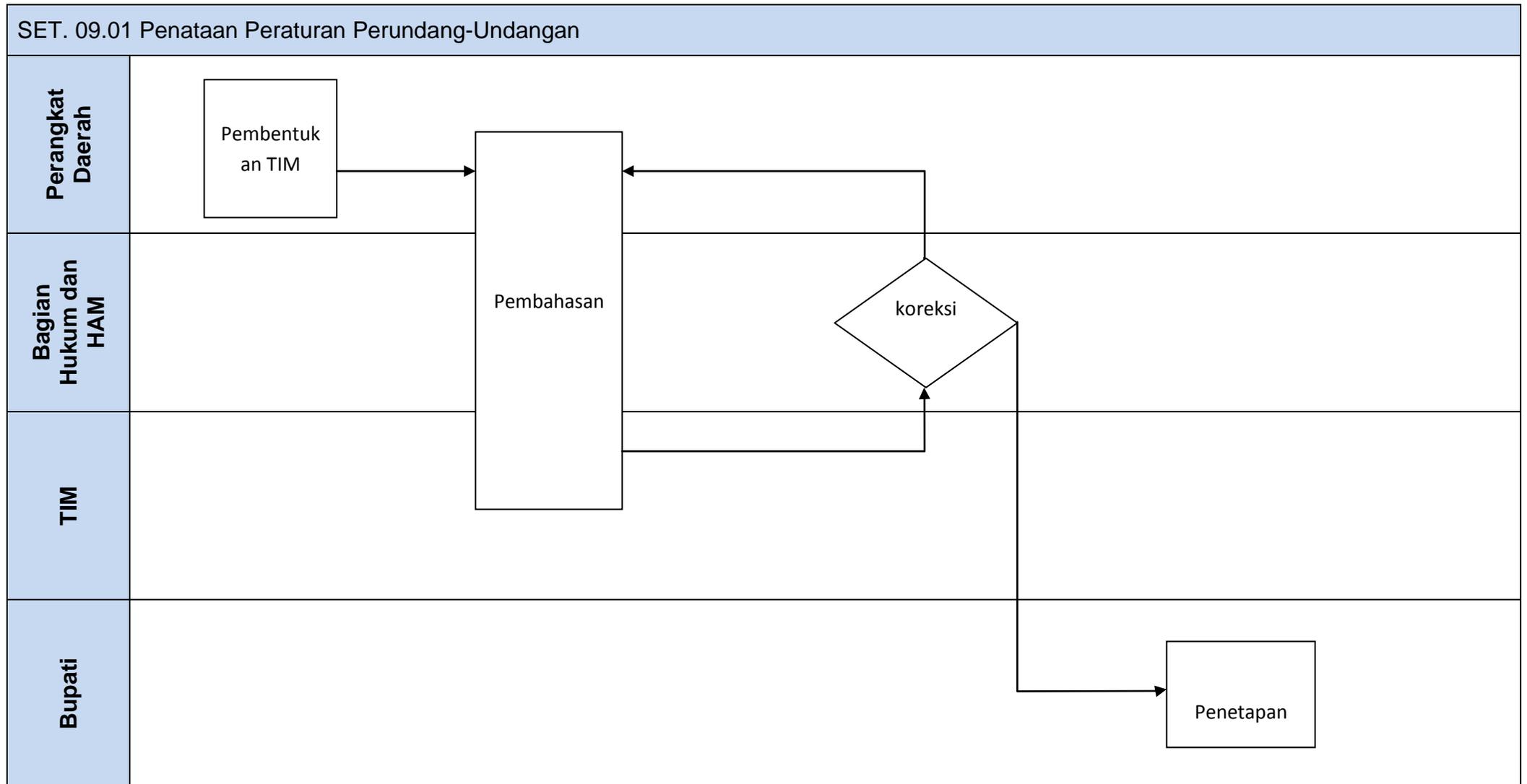
PETA LINTAS FUNGSI SET. 08.02
PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL



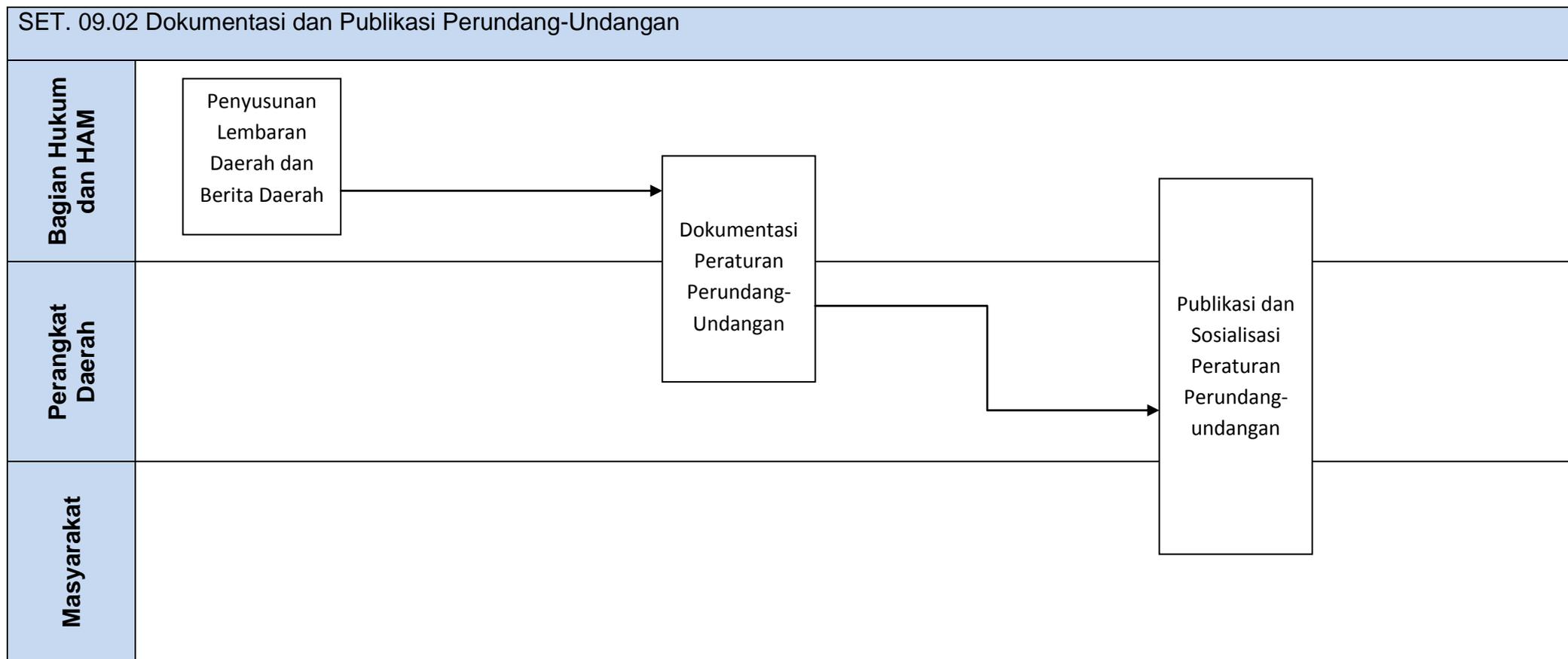
PETA LINTAS FUNGSI SET. 08.03
PENDAMPINGAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH



**PETA LINTAS FUNGSI SET. 09.01
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

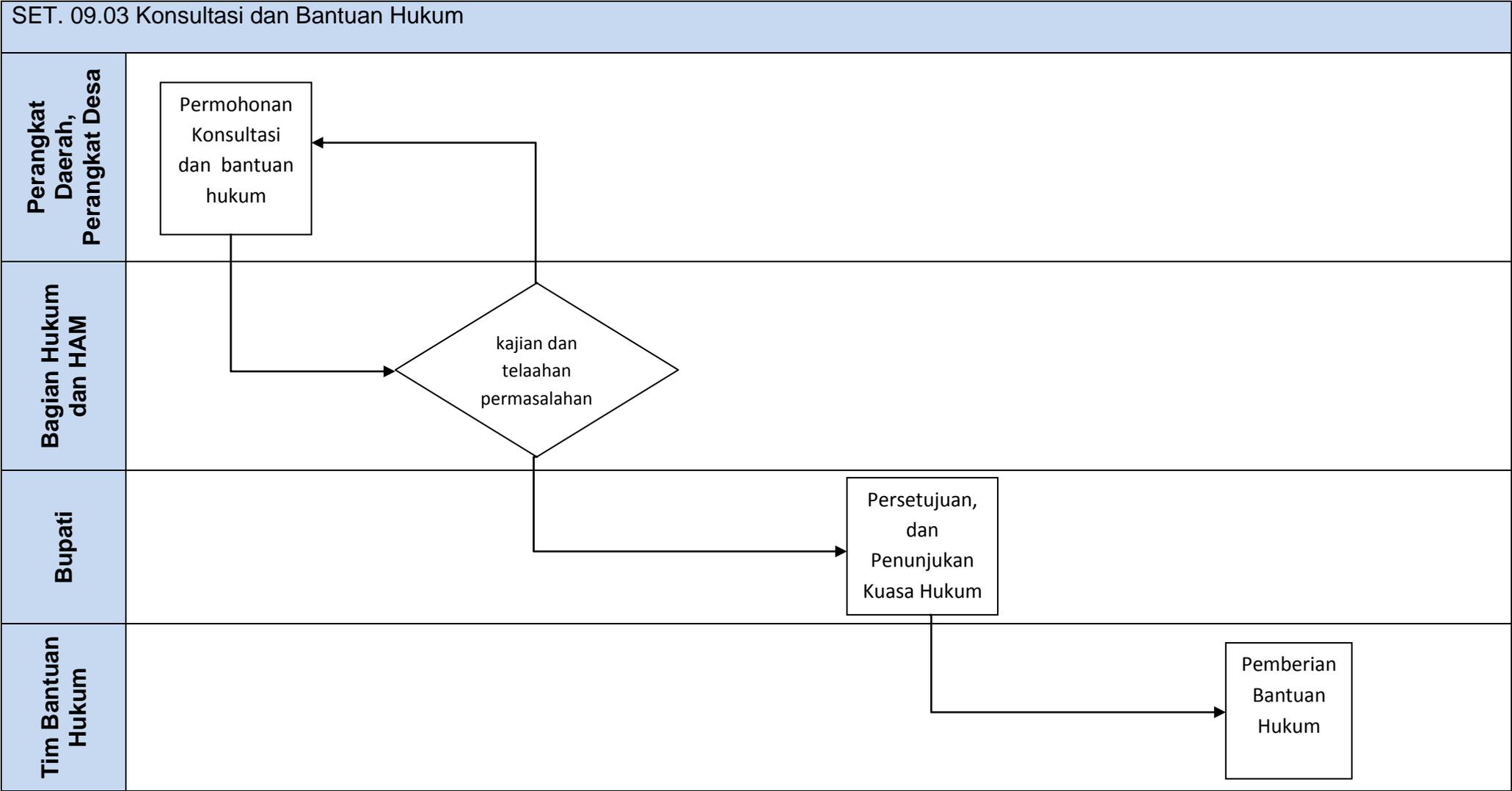


PETA LINTAS FUNGSI SET 09.02
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

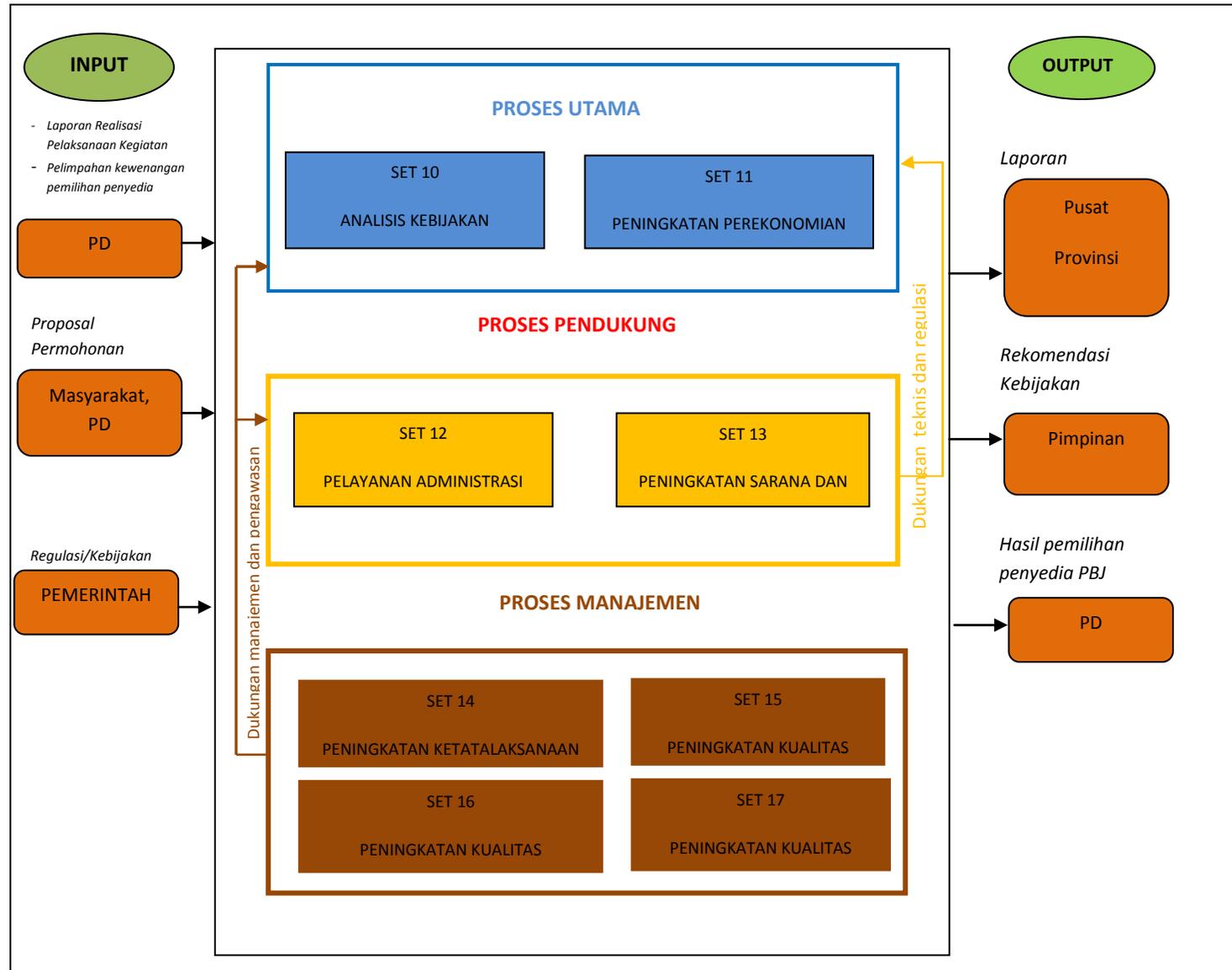


**PETA LINTAS FUNGSI SET 09.03
KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM**

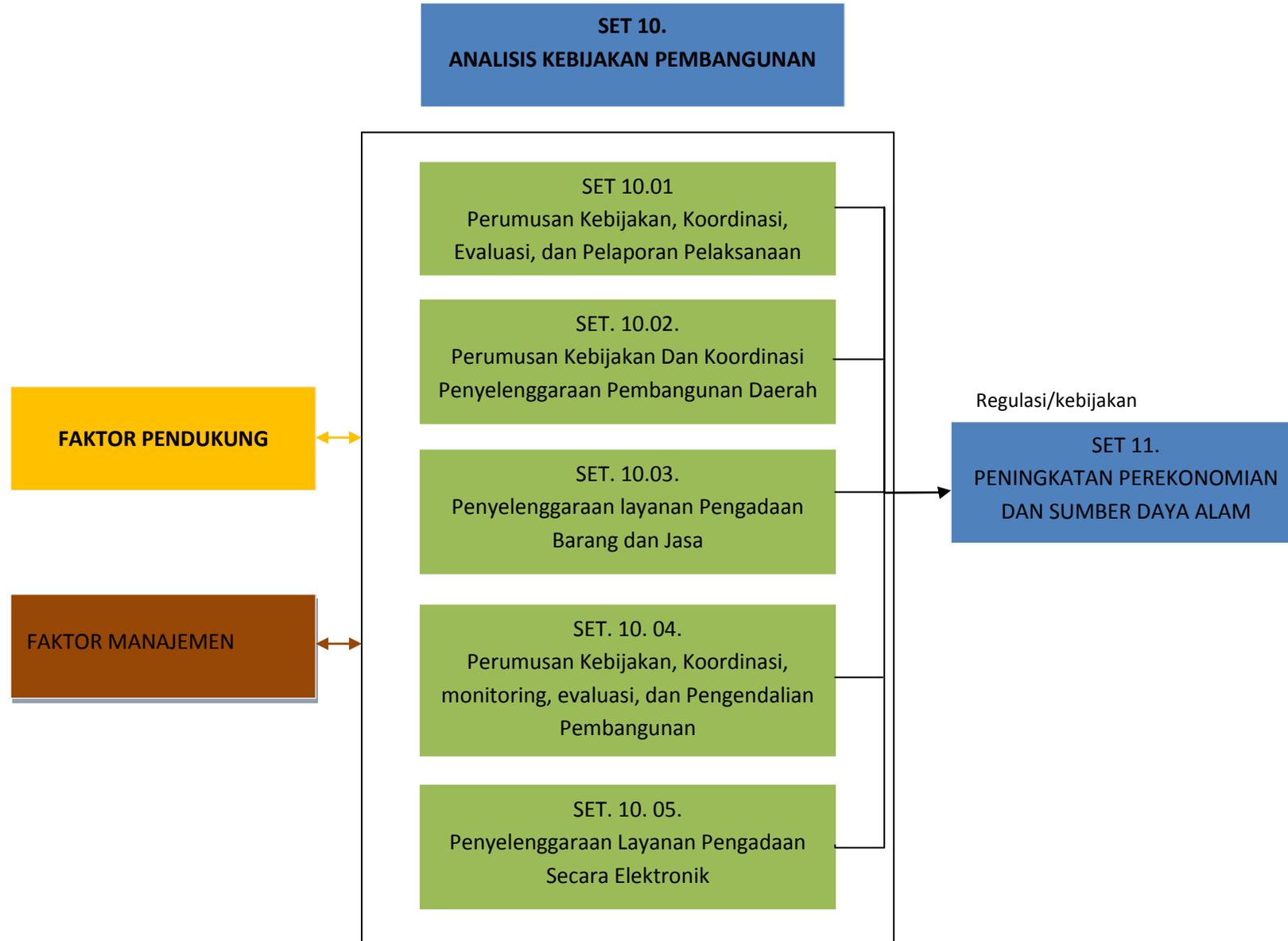
SET. 09.03 Konsultasi dan Bantuan Hukum



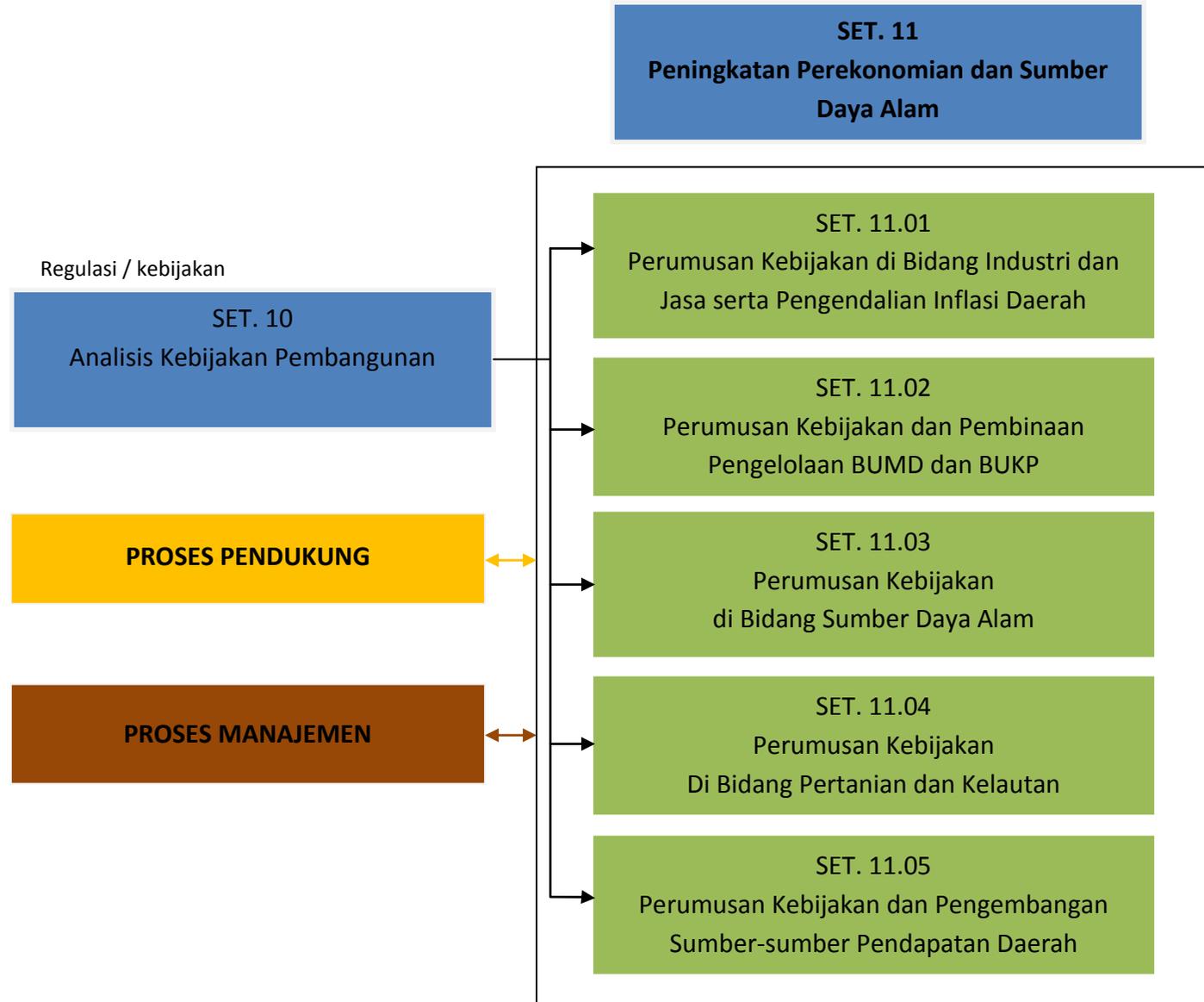
PEMETAAN PROSES BISNIS
SASARAN 6
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKAT



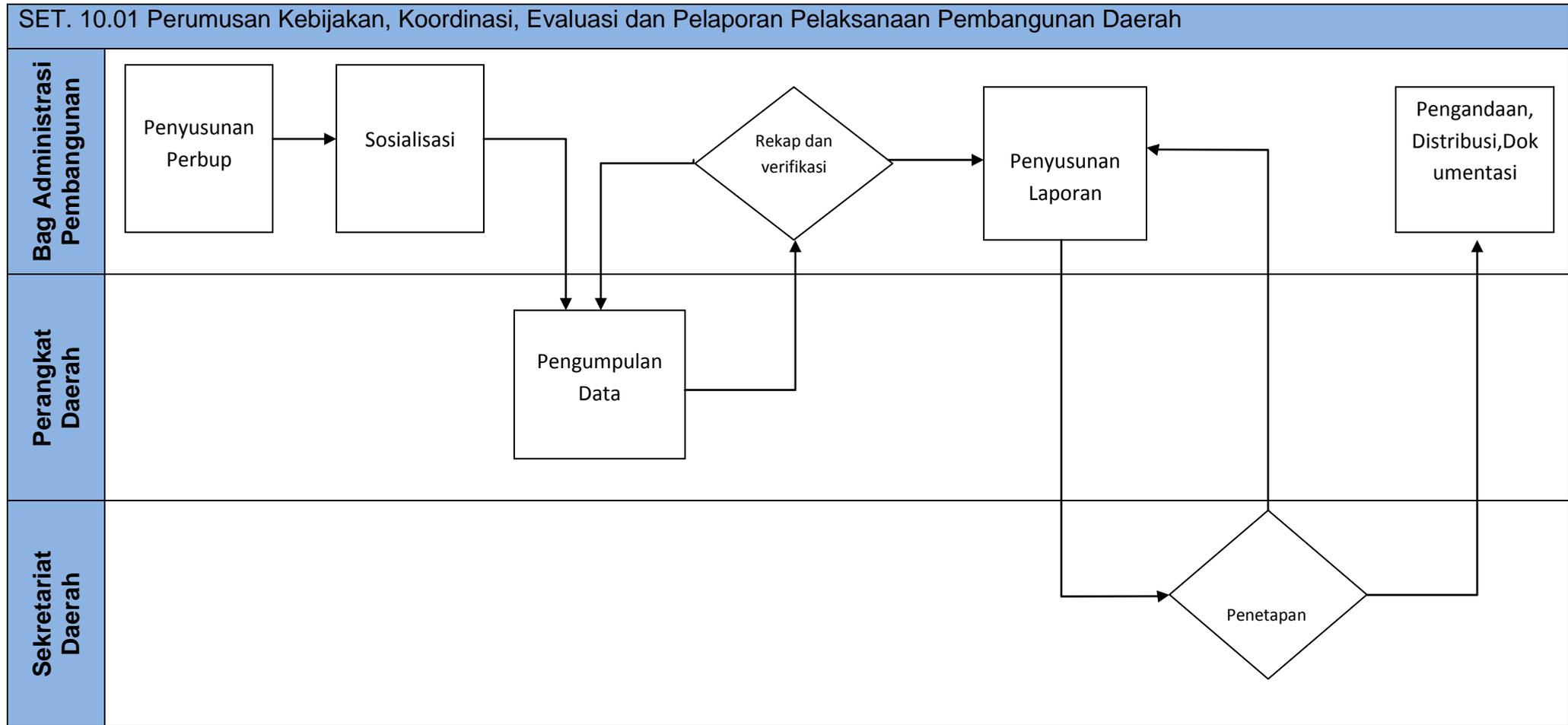
**PETA SUB PROSES SET. 10
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**



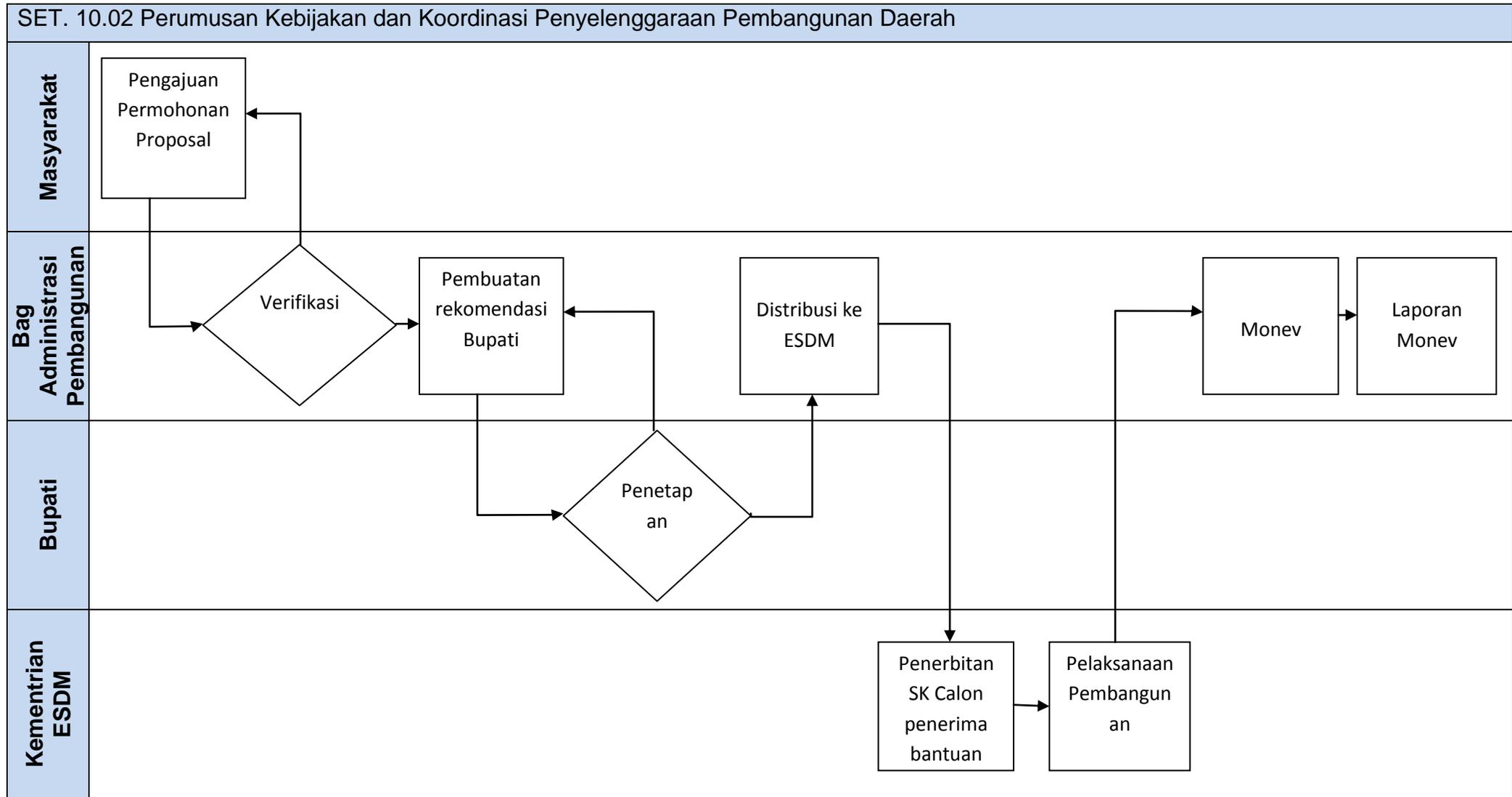
**PETA SUB PROSES SET. 11
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**



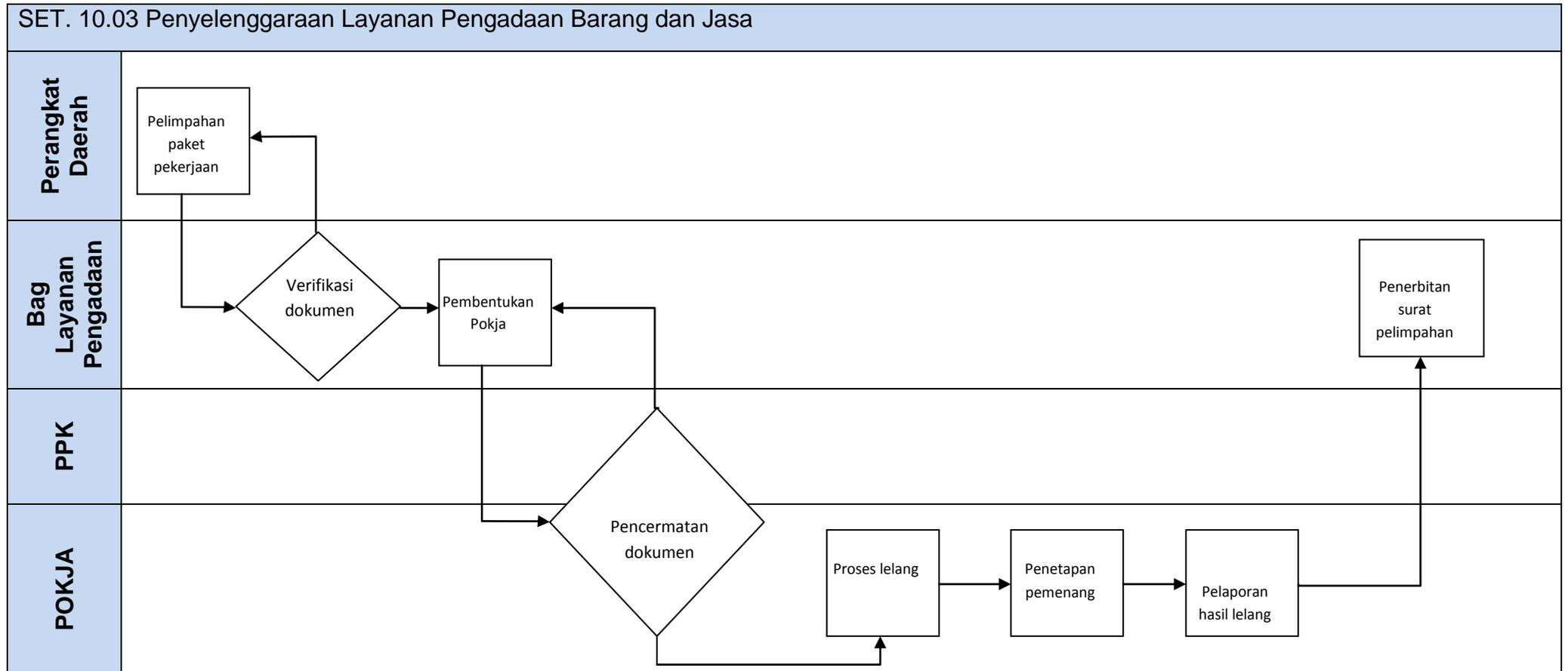
PETA LINTAS FUNGSI SET. 10.01
PERUMUSAN KEBIJAKAN, KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



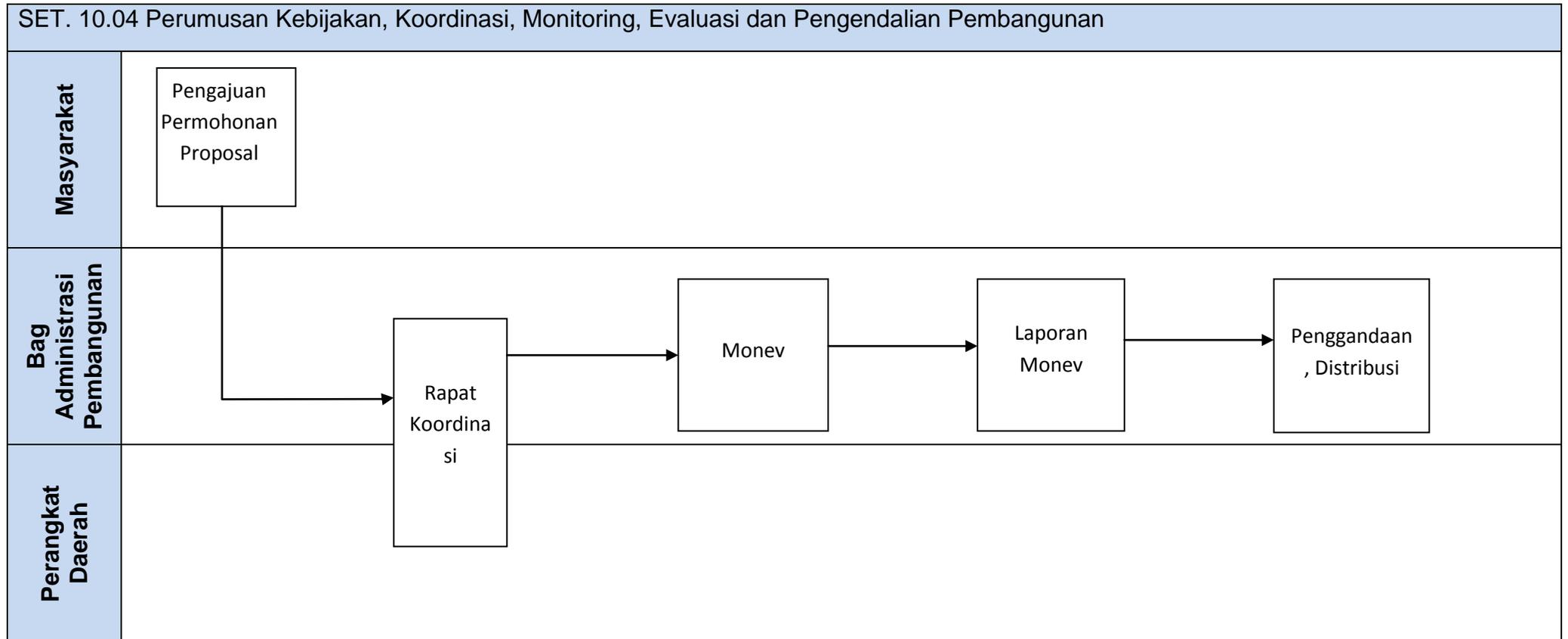
PETA LINTAS FUNGSI SET. 10.02
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH



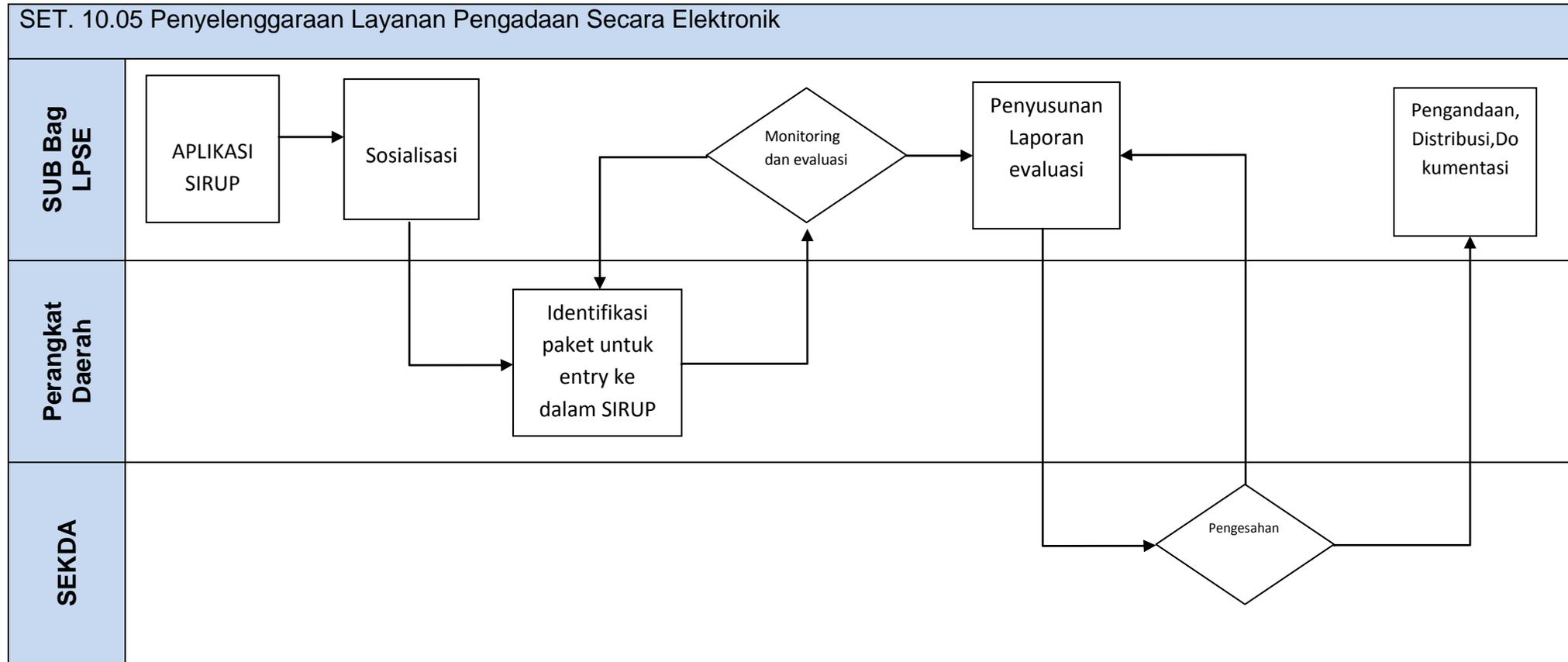
**PETA LINTAS FUNGSI SET. 10.03
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**



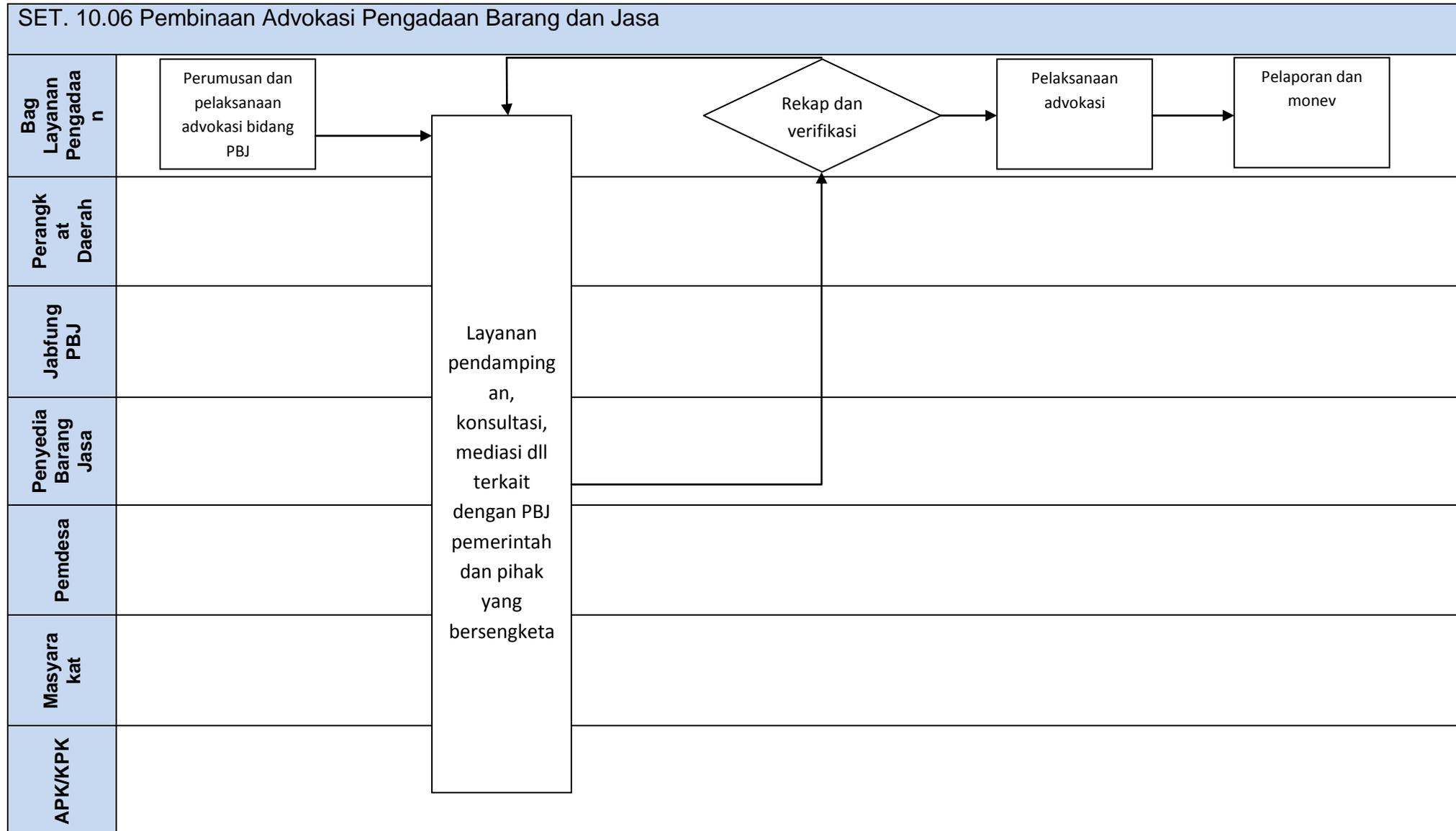
PETA LINTAS FUNGSI SET. 10.04
PERUMUSAN KEBIJAKAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN



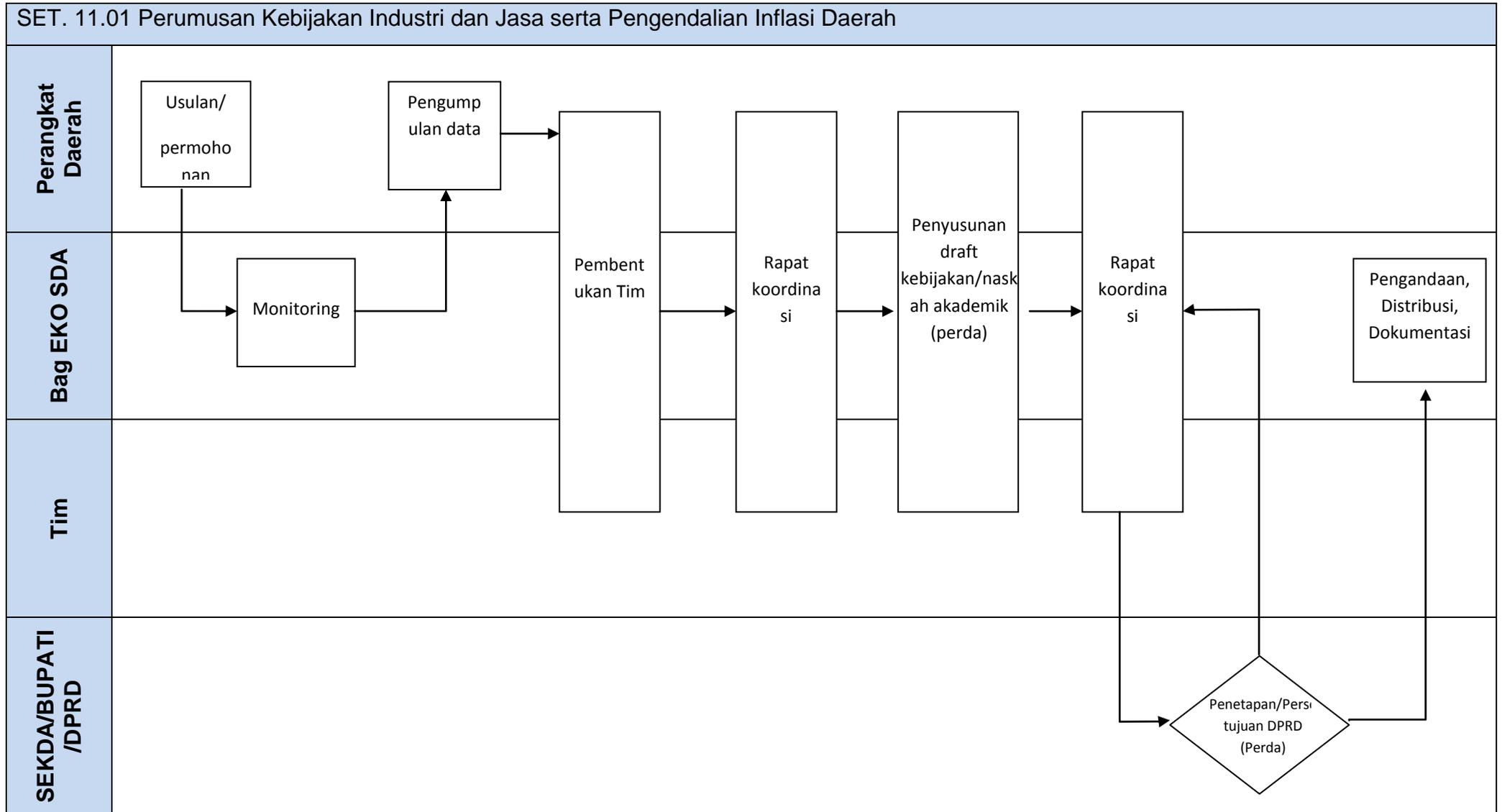
**PETA LINTAS FUNGSI SET. 10.05
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**



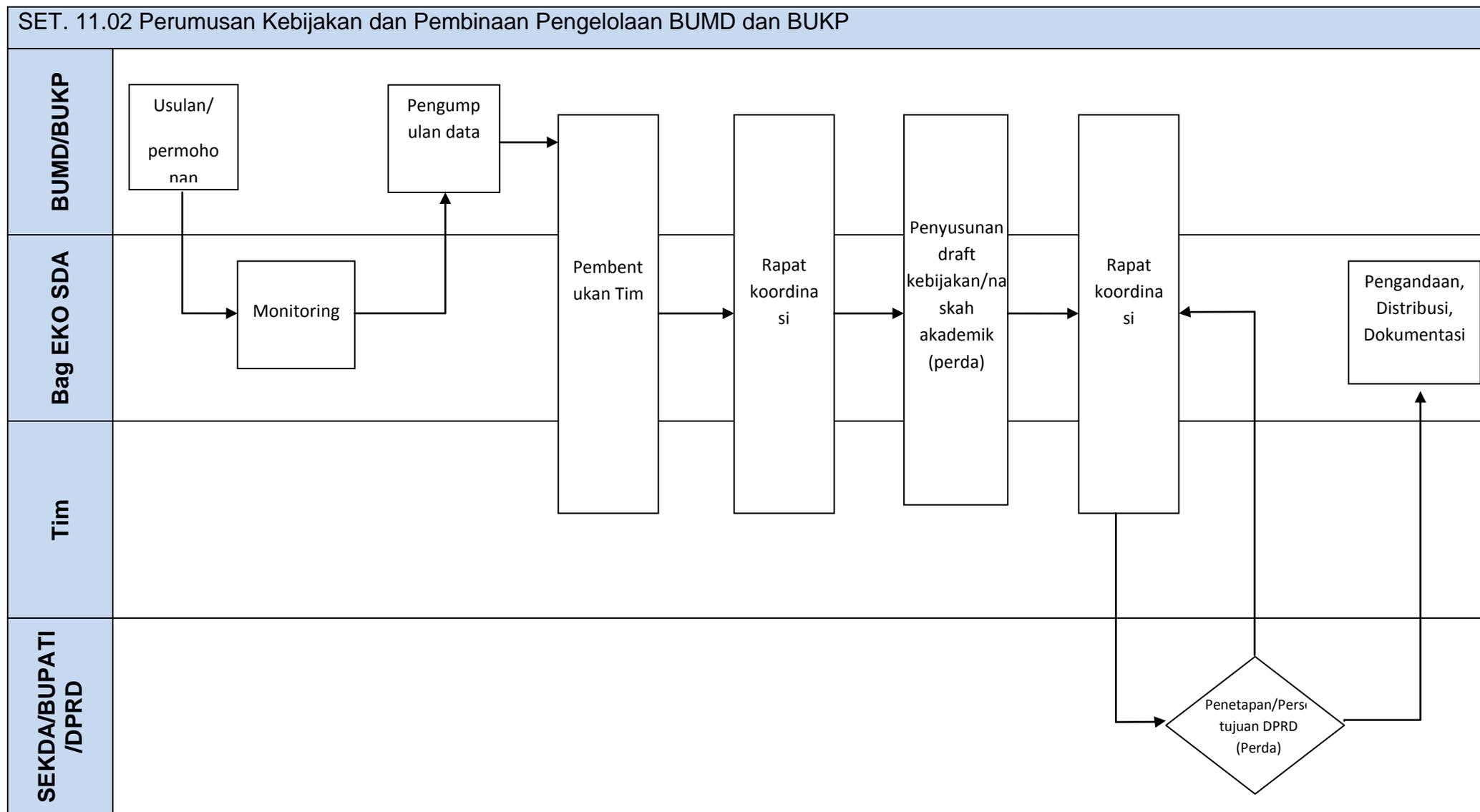
**PETA LINTAS FUNGSI SET. 10.06
PEMBINAAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA**



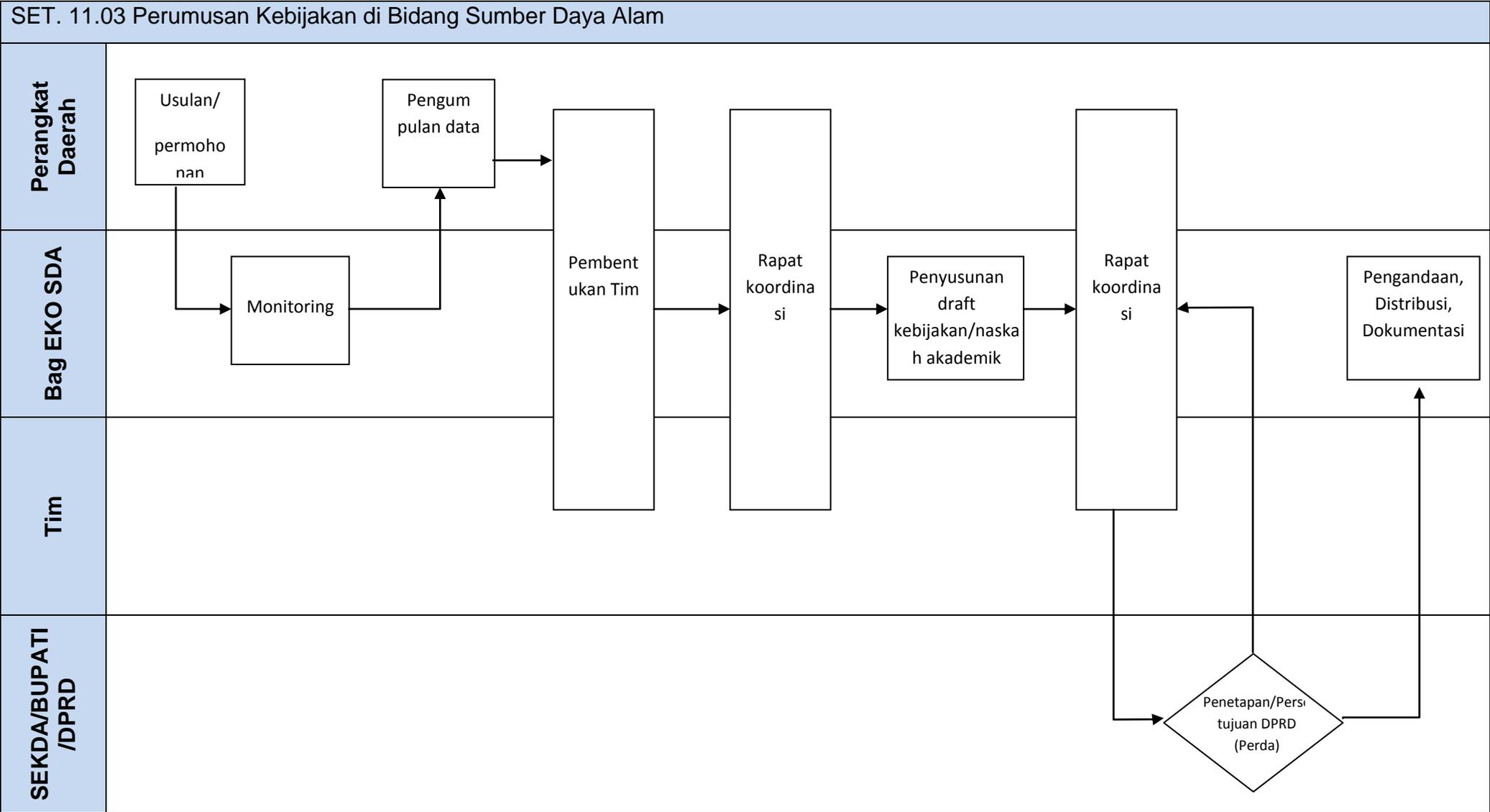
PETA LINTAS FUNGSI SET. 11.01
PERUMUSAN KEBIJAKAN INDUSTRI DAN JASA SERTA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH



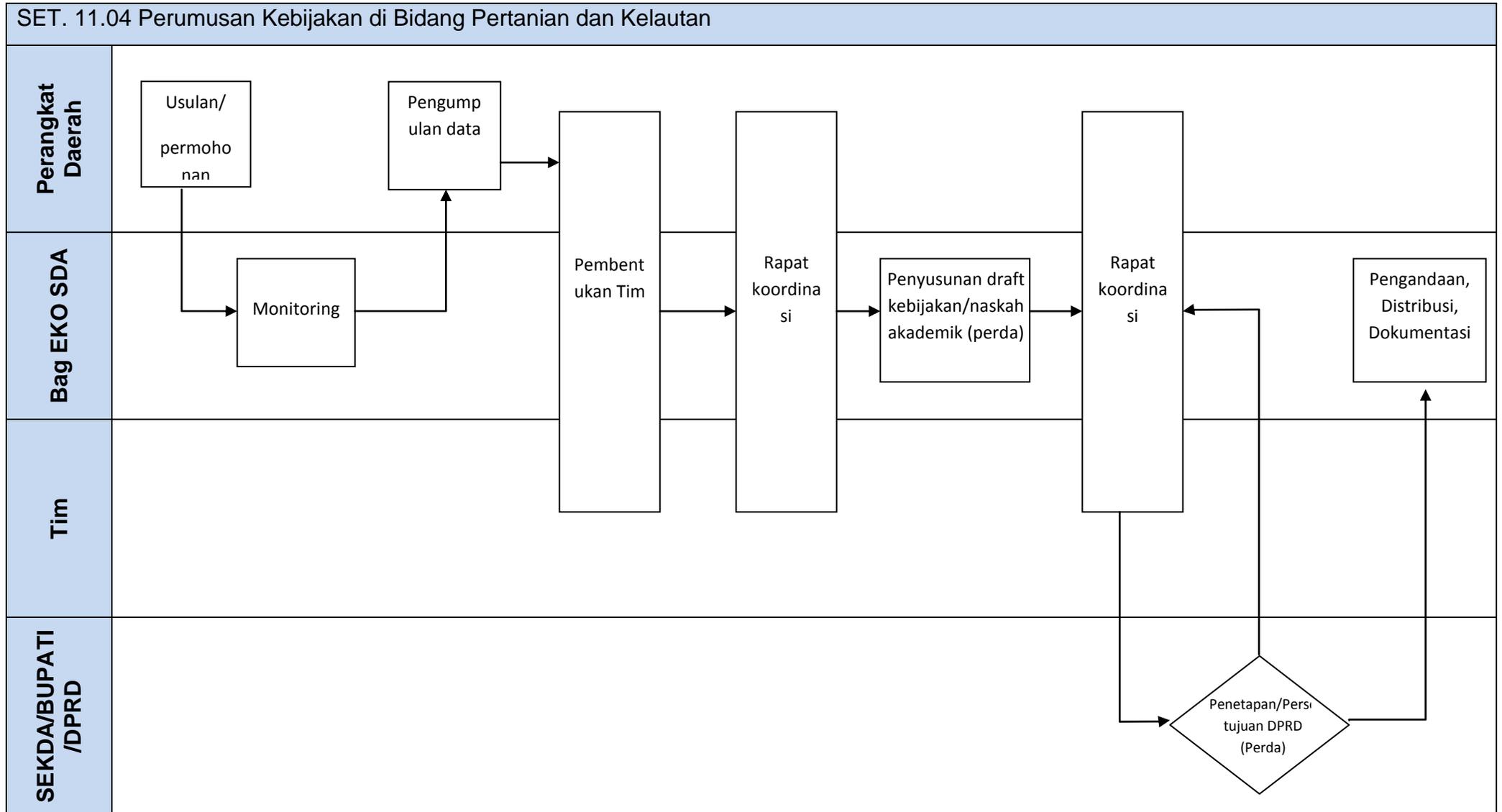
**PETA LINTAS FUNGSI SET. 11.02
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN BUMD DAN BUKP**



**PETA LINTAS FUNGSI SET. 11.03
PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM**

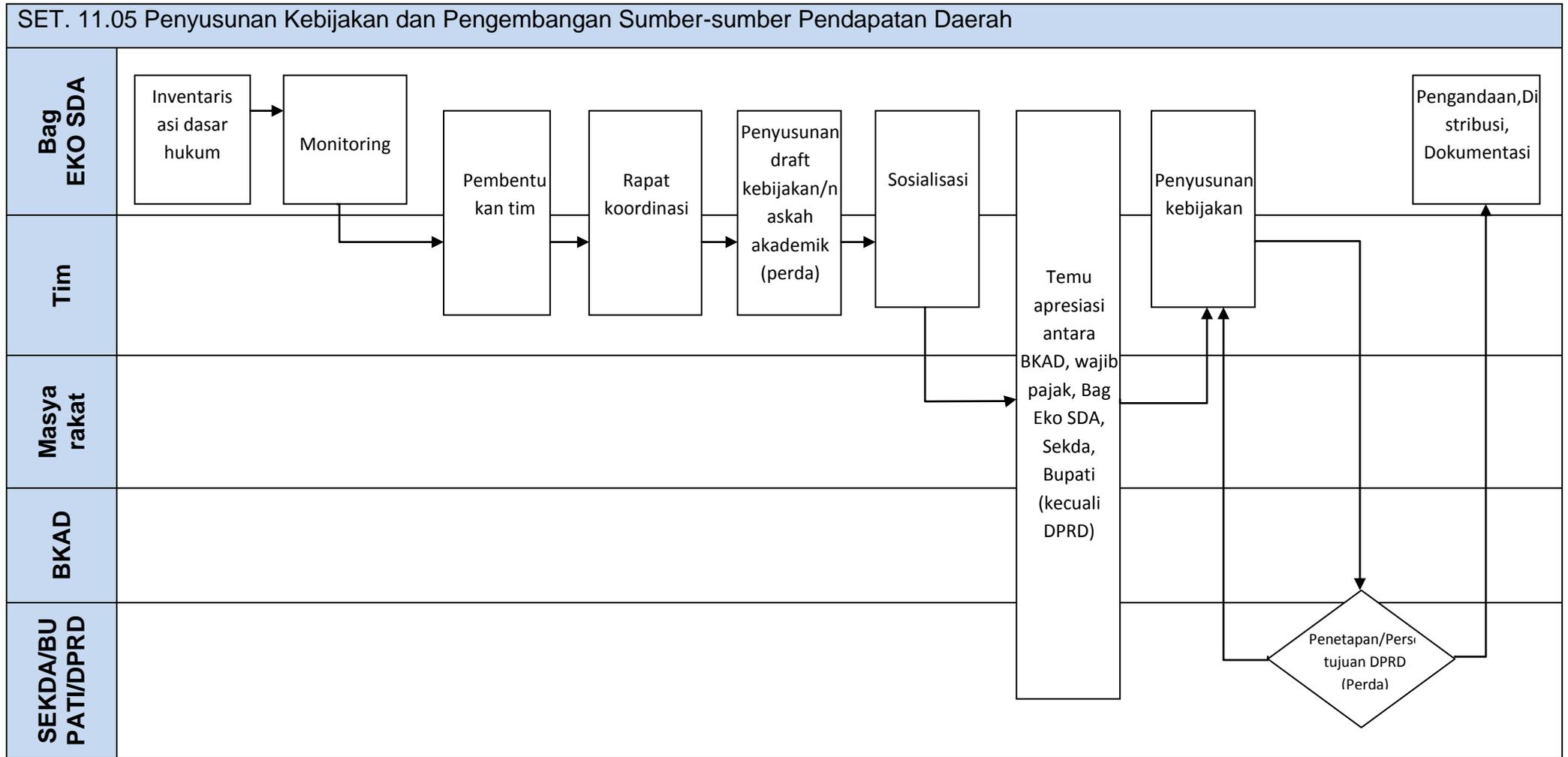


**PETA LINTAS FUNGSI SET. 11.04
PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN**



PETA LINTAS FUNGSI SET. 11.05

PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH



SEKRETARIS DAERAH,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO